KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

LAPORAN KINERJA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
2020

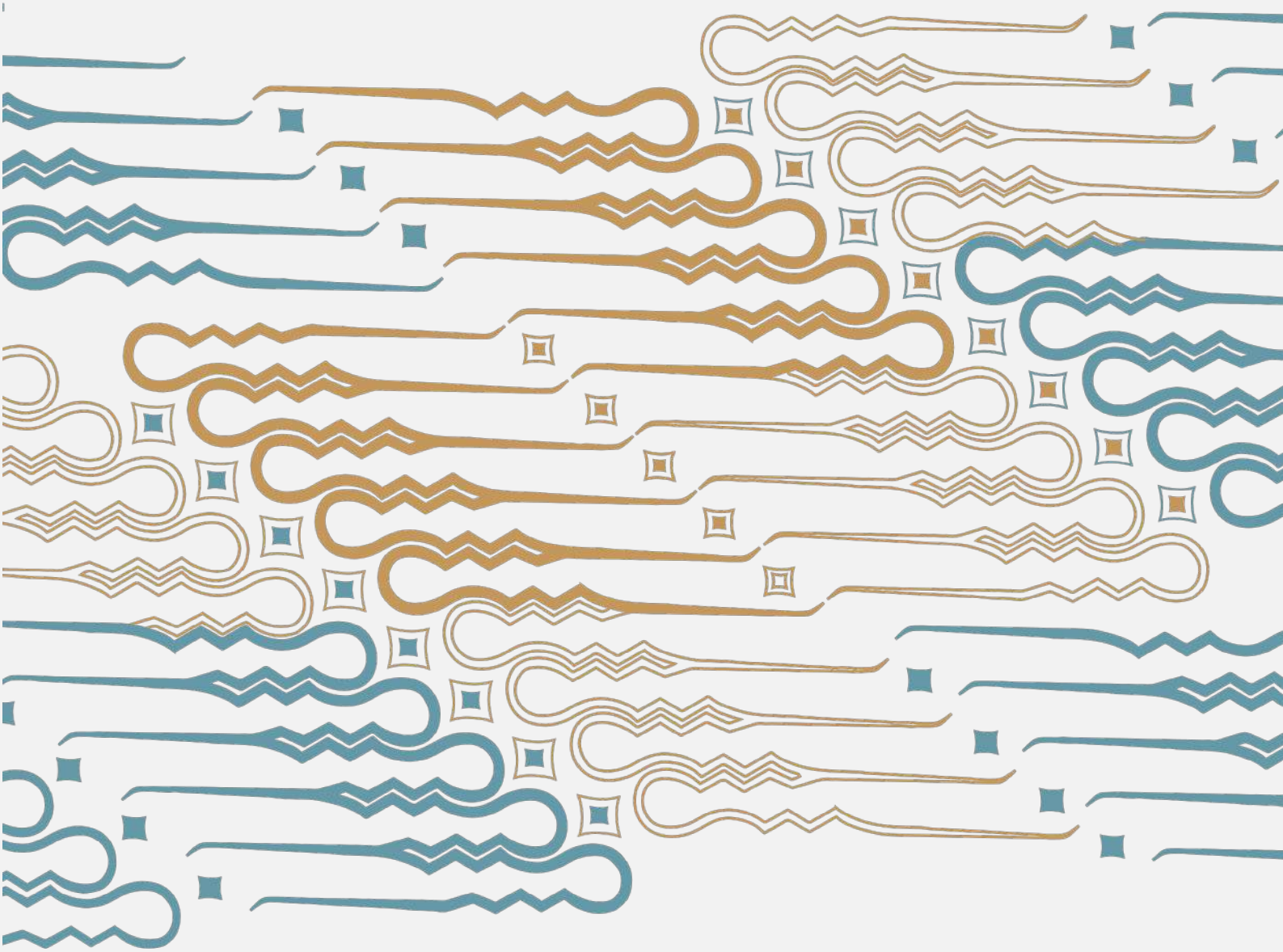

Executive Summary

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BPPK. Pada tahun 2020, keseluruhan dari 20 IKU berstatus Hijau dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya (realisasi: 99,36% dari target: 90%)
2. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya (realisasi: 99,51% dari target: 85%)
3. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik (realisasi: 96,12% dari target: 93%)
4. Indeks kepuasan pengguna layanan (realisasi: 4,41 dari target: 4)
5. Persentase pengembangan *Instructional System Design* (realisasi: 100% dari target: 100%)
6. Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A (realisasi: 100% dari target: 100%)
7. Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital (realisasi: 82,52% dari target: 50%)
8. Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC (realisasi: 111,46% dari target: 100%)
9. Indeks kualitas penelitian (realisasi: 238 dari target: 90)
10. Persentase kualitas implementasi program sertifikasi (realisasi: 100% dari target: 80%)
11. Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran (realisasi: 5 dari target: 4)
12. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan (realisasi: 98% dari target: 93,67%)
13. Persentase efisiensi belanja birokrasi (realisasi: 73,87% dari target: 10%)
14. Persentase penyelesaian program RBTK (realisasi: 93,42% dari target: 85%)
15. Indeks integritas organisasi (realisasi: 108,68 dari target: 95,05)
16. Tingkat implementasi *learning organization* (realisasi: 95,59 dari target: 75)

17. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti (realisasi: 92,52% dari target: 89%)
18. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 (realisasi: 94 dari target: 85)
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (realisasi: 98,24% dari target: 95%)
20. Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK (realisasi: 100% dari target: 85%)

Sedangkan, ikhtisar capaian kinerja Tahun Anggaran 2020 secara umum adalah sebagai berikut:

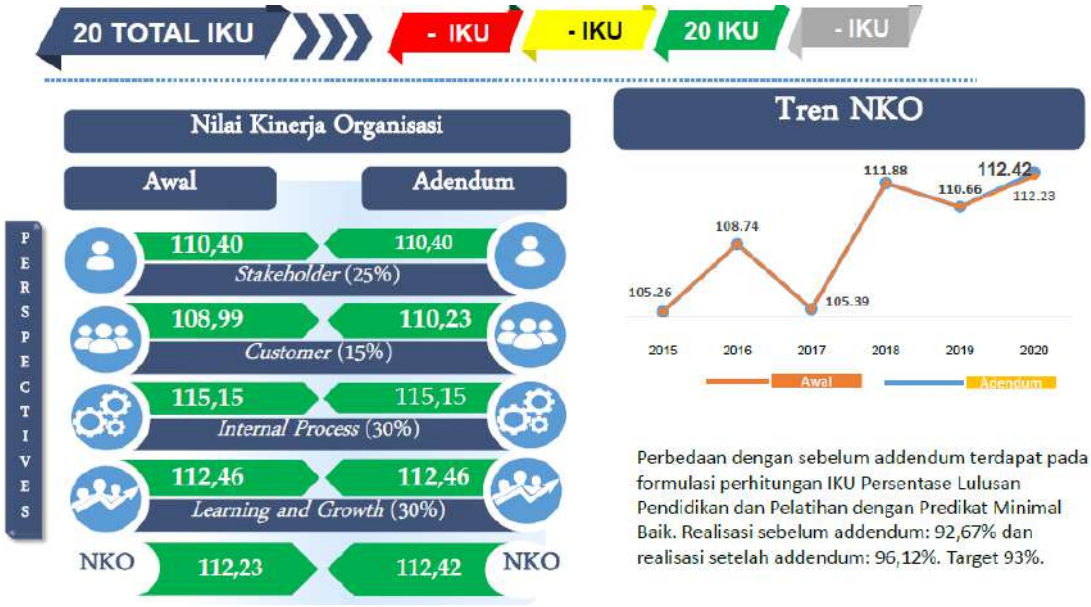

Untuk mewujudkan strategi dan kebijakan pada periode Tahun Anggaran 2020 ini, BPPK memiliki 1 program dan 9 kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 533.047.579.000 dan terealisasi untuk membiayai program kegiatan sebesar Rp. 457,953,218,886 atau 85,91%.

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
015.11.04	Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	533,047,579,000	457,953,218,886	85.91
1731	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara di Daerah	1,640,462,000	0,211,056,923	76.62
1732	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	1,424,613,000	18,982,014,063	88.60

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1733	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepabeanan dan Cukai	7,521,807,000	9,015,740,361	69.09
1734	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	15,927,706,000	12,784,935,279	80.27
1735	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	17,994,458,000	14,916,340,277	82.89
1736	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perpajakan	30,860,536,000	26,846,850,272	86.99
1737	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepemimpinan dan Manajemen serta Pengelolaan Beasiswa Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan	83,011,544,000	76,681,274,857	92.37
1738	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara (Politeknik Keuangan Negara STAN)	172,958,992,000	150,671,373,972	87.11
1739	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPK	71,707,461,000	67,843,632,882	94.61

Kata Pengantar

Perjalanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam menerapkan strategi *Corporate University* secara efektif dimulai dari ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK/924/KMK.011/2018. Perubahan tersebut dilakukan BPPK untuk mengimbangi perkembangan pengelolaan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di Kementerian Keuangan yang bergerak cepat dan dinamis. Sebagai upaya pembenahan dan evaluasi diri, selama dua tahun terakhir, BPPK telah mengajukan usulan penataan organisasi untuk dapat menjadi organisasi yang *lean, green, and clean*.

Rencana perubahan BPPK tersebut tertuang pada Renstra 2020-2024, dimana selama lima tahun ke depan BPPK diharapkan mampu untuk mengelola pendidikan dan memperkuat pelatihan berkualitas tinggi bagi SDM Kemenkeu dalam kerangka *Corporate University*. BPPK juga diharapkan mampu untuk mengembangkan program sertfikasi kompetensi dan mewujudkan manajemen pengentahuan di bidang keuangan Negara.

Disisi lain, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan juga masih mengemban amanat yang lain berupa inisiatif strategis implementasi 70% *full e-learning* pada tahun 2021. Kebutuhan atas perubahan ini menjadi semakin *massive* dan signifikan dengan adanya wabah pandemi Covid-19 pada akhir Triwulan I tahum 2020. Guna mencegah penyebaran wabah tersebut, Pemerintah dan Kemenkeu tidak hanya melakukan pembatasan kegiatan kerja dan perkantoran melalui penerapan *flexible working space* dan *work from home*. Kemenkeu juga membatasi ruang gerak pendidikan dan pelatihan yang dilakukan melalui tatap muka langsung. Selama tahun 2020, BPPK melakukan transformasi besar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan melalui konversi kegiatan tatap muka menjadi Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan *e-learning*. Kombinasi dari perubahan kebijakan strategis, *pandemic*, dan penetapan target tersebut semakin mendorong Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk mencapai kinerja terbaik guna mendukung Visi dan Misi Kementerian Keuangan.

Kami sangat memahami, bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini seyogyanya tidak hanya memenuhi kewajiban formal. Laporan Kinerja harus mampu memberikan gambaran kepada *stakeholders* mengenai *progress* yang dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam merespon perubahan-perubahan. Laporan ini juga memberikan *baseline* dalam penilaian kinerja satuan kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, khususnya sebagai bahan evaluasi dalam penataan organisasi ke depannya.

Kami berharap agar laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pembaca. Kami percaya bahwa dengan dukungan penuh para *stakeholder*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan akan mampu memberikan manfaat kepada Kementerian Keuangan khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang adapatif sesuai kemajuan teknologi.

Kepala Badan,

Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

Daftar Isi

EXECUTIVE SUMMARY i
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR LAMPIRAN vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR DIAGRAM viii

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi 1
C. Struktur Organisasi 2
D. Sistematika Penyajian 4

Bab Perencanaan dan Penetapan Kinerja

A. Pendahuluan 5
B. Visi BPPK 5
C. Misi BPPK 5
D. Arah Kebijakan dan Strategi 6
E. Target Kinerja 6
F. Penetapan Kinerja 8

Bab Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Renstra 11
B. Capaian Kinerja 11
C. Realisasi Anggaran 66
D. Realisasi Output Kegiatan 69
E. Kinerja Lainnya 74

Bab Penutup

Penutup 79

LAMPIRAN

Daftar Lampiran

Lampiran I Pengukuran Kinerja BPPK Tahun 2020

Lampiran II Penetapan Kinerja BPPK Tahun 2020

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Matriks Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan..... 7

Tabel 2.2 Kontrak Kinerja IKU BPPK Tahun 2020..... 9

Tabel 3.1 Capaian Renstra BPPK Tahun 2020.....11

Tabel 3.2 Target dan Realisasi serta Capaian IKU BPPK Tahun 2020..... 12

Tabel 3.3 Tren Besaran Risiko BPPK Tahun 2020 14

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK Tahun 2020 68

Tabel 3.5 Realisasi *Output* Kegiatan BPPK Tahun 2020 69

Daftar Diagram

Diagram 1.1 Struktur Organisasi BPPK 3

Diagram 2.1 *Strategy Map* BPPK Tahun 2020 9

Diagram 3.1 Peta Risiko BPPK Tahun 2020 13

Bab I: Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)* memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan asas akuntabilitas sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perwujudan dari peraturan di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut, sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam bentuk laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah akan dapat diwujudkan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta BPPK untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPPK Tahun 2020 ini juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan kinerja BPPK di periode yang akan datang.

B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 8 April 2020 tentang Kementerian Keuangan, BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di Bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPK menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di Bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
b) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di Bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
d) pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi

BPPK terdiri dari Sekretariat Badan, 6 Pusdiklat (Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, dan Pusdiklat Keuangan Umum) serta Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Untuk penyelenggaraan diklat di daerah, BPPK memiliki unit pelaksana teknis yaitu 11 Balai Diklat Keuangan (Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado) dan 1 Balai Diklat Kepemimpinan (Magelang).

Struktur organisasi BPPK seperti terlihat dalam Diagram 1.1 . sebagai berikut:

Diagram 1.1
Struktur Organisasi BPPK

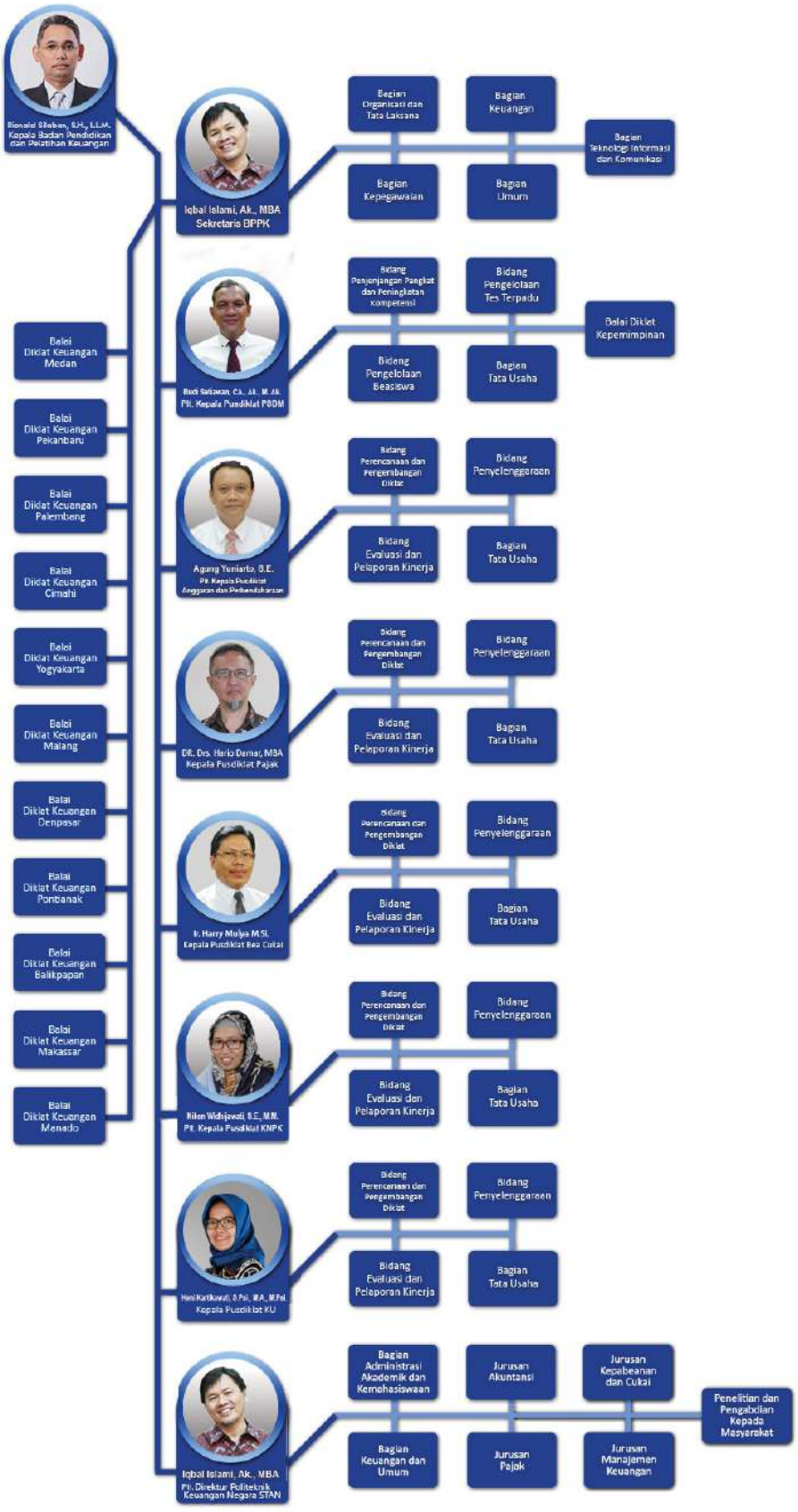

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPPK Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang
B. Tugas dan Fungsi
C. Struktur Organisasi
D. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

A. Pendahuluan
B. Visi
C. Misi
D. Arah Kebijakan dan Strategi
E. Target Kinerja
F. Penetapan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Renstra
B. Capaian Kinerja
C. Realisasi Anggaran
D. Realisasi Output Kegiatan
E. Kinerja Lainnya

Bab IV Penutup

Bab II: Perencanaan dan Penetapan Kinerja

A. Pendahuluan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Unit. Dalam hal ini, BPPK telah menetapkan rencana strategis tahun 2020-2024 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor KEP-124/PP/2020 tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2020-2024 yang didalamnya berisi tentang: visi, misi, arah kebijakan, dan strategi serta target kinerja BPPK selama periode Tahun 2020-2024.

B. Visi BPPK

BPPK telah menetapkan visi tahun 2020-2024, yaitu menghasilkan SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Beretika dalam rangka mendukung Visi Kementerian keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Dengan Visi ini BPPK berkomitmen untuk terus mencetak punggawa keuangan negara yang tidak hanya memiliki kualitas kompetensi dan kinerja tinggi, tetapi juga beretika dalam rangka mendukung visi misi Kementerian Keuangan dan juga Indonesia.

C. Misi BPPK

Dalam mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, BPPK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengelola pendidikan yang berkualitas tinggi dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
2. Memperkuat pelatihan yang berdampak tinggi bagi SDM keuangan negara dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
3. Mengembangkan program sertifikasi kompetensi keuangan negara yang berkualitas dan *fit for purposes*.
4. Mewujudkan manajemen pengetahuan keuangan negara yang andal dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.

5. Mengembangkan sistem tata kelola berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal.

D. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh BPPK dilakukan untuk mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPPK telah menyusun 7 arah kebijakan dan 18 strategi untuk mendukung pencapaian ketujuh arah kebijakan yang telah ditetapkan:

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang *fit for purposes* di bidang keuangan negara, termasuk pada penguasaan teknologi informasi.
2. Pengelolaan beasiswa Kementerian Keuangan yang optimal.
3. Penguatan sistem pembelajaran berbasis digital dan pelatihan berdampak tinggi pada peningkatan kinerja keuangan negara.
4. Optimalisasi program sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan.
5. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kemenkeu.
6. Organisasi dan SDM yang *agile* dalam rangka penguatan implementasi Kemenkeu Corpu.
7. Pemutakhiran sarana prasarana berwawasan lingkungan dan teknologi informasi yang efektif dan efisien.

E. Target Kinerja

Pada tahun 2020-2024, BPPK berusaha menjadi mitra strategis bagi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengembangan SDM keuangan negara. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut BPPK juga didukung oleh pendanaan yang memadai dengan jumlah yang mengalami kecenderungan meningkat di setiap tahun. Peningkatan jumlah dana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit Kementerian Keuangan, khususnya di Bidang pengembangan SDM keuangan negara. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

a. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya.
b. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya.

Adapun target kinerja untuk Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 tidak diukur melalui IKU, tetapi tetap dihitung sebagai target kinerja dan tertuang dalam Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Output Program (IOP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2020.

Rincian target kinerja kegiatan BPPK dari Tahun 2020 s.d. 2024 yang tertuang dalam Renstra BPPK Tahun 2020-2024 seperti tertuang dalam tabel halaman berikut:

Tabel 2.1
Matriks Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					UIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase lulusan pendidikan dengan predikat minimal baik	90%	93%	93%	93%	93%	PKN STAN
2	Indeks kualitas penelitian	90	148	193	238	283	PKN STAN
3	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	-	75%	80%	82%	85%	Pusdiklat PSDM
4	Tingkat implementasi *learning organization**	75%	77%	80%	82%	85%	Setban, Seluruh Pusdiklat, dan PKN STAN
5	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya**	90%	80%	82%	85%	87%	Seluruh Pusdiklat
6	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	77%	84%	85%	86%	87%	Seluruh Pusdiklat
7	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	90%	93%	-	-	-	Seluruh Pusdiklat, Balai
8	Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran/CGI	-	-	90%	92%	94%	Seluruh Pusdiklat
9	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	50%	70%	70%	70%	80%	Seluruh Pusdiklat
10	Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	Seluruh Pusdiklat
11	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4	4	5	5	5	Pusdiklat, Balai
12	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	70%	80%	80%	80%	80%	Pusdiklat
13	Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC	100%	100%	100%	100%	100%	Pusdiklat
14	Tingkat Kematangan *Knowledge Management*	-	-	2 (BPPK)	2 (Kemenkeu)	2 (Kemenkeu)	Pusdiklat
15	Persentase jam pelatihan SDM keuangan negara KLID terhadap jam kerja pegawai***	-	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	Seluruh Pusdiklat
16	Persentase pegawai yang telah memenuhi SKJ****	93,67%	94%	94%	94%	94%	Seluruh Pusdiklat dan PKN STAN
17	Persentase kualitas pengelolaan BLU****	80%	80%	80%	80%	80%	PKN STAN

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					UIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
18	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK****	85%	87%	90%	92%	95%	Setban

* Pada tahun 2020, Tingkat implementasi *learning organization* BPPK memiliki lingkup UE1 BPPK. Mulai tahun 2021, lingkup tingkat implementasi *learning organization* BPPK menjadi level Kemenkeu.
** Pada tahun 2021 akan ada reformulasi, yang menyebabkan target turun.
*** 0,25% persentase jam pelatihan SDM keuangan KLID termasuk ke dalam 4,5% persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu.
**** *Mandatory* Kemenkeu.

F. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dari atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu periode tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Manfaat lainnya adalah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut ini adalah *Strategy Map* dan IKU BPPK berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala BPPK untuk Tahun 2020:

Diagram 2.1
***Strategy Map* BPPK Tahun 2020**

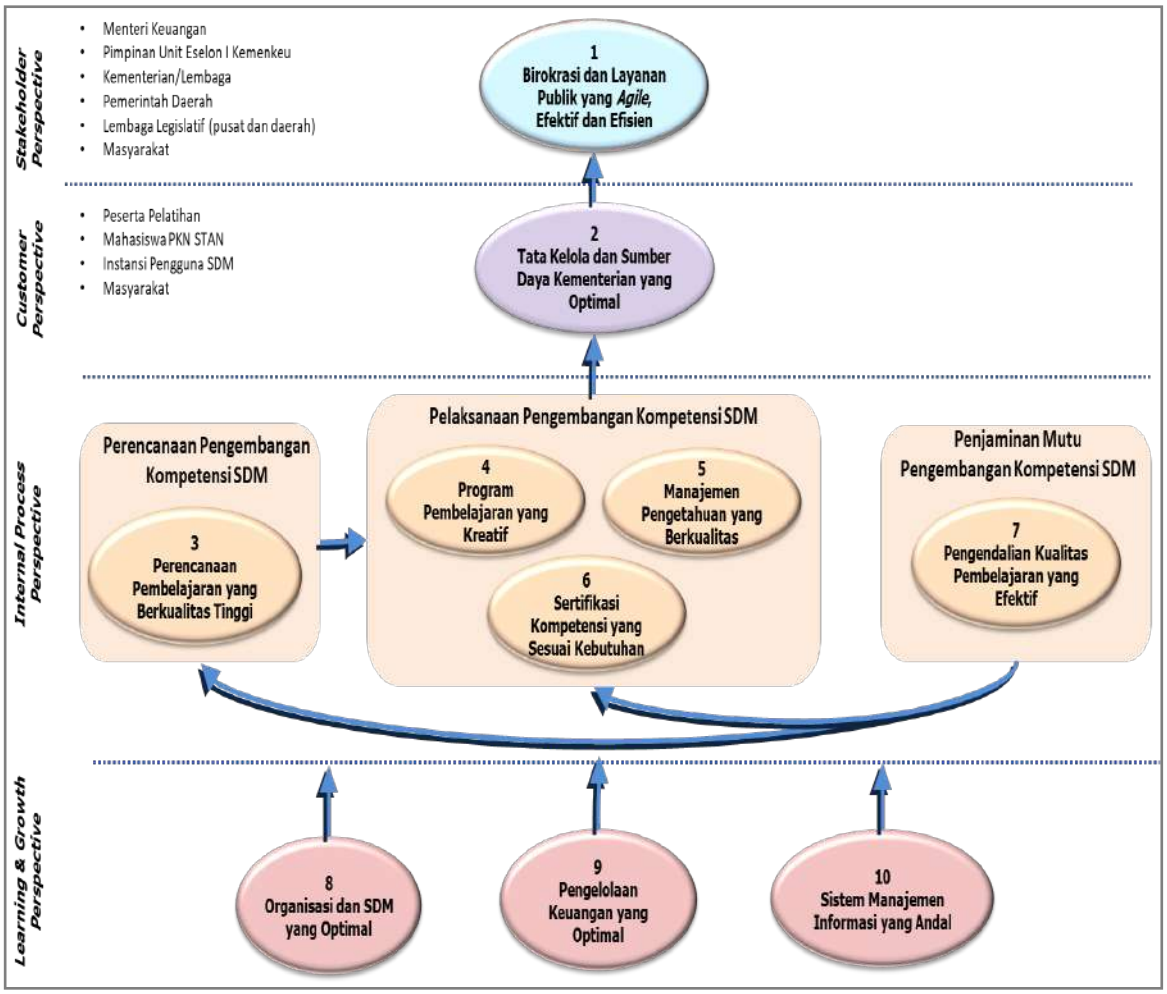

Tabel 2.2
Kontrak Kinerja IKU BPPK Tahun 2020

Program	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)		Indikator Kinerja Utama		Target 2020
1	2		3		4
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan	1	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	1a-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%
	2	Tata kelola dan sumber daya kementerian yang optimal	2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	85%
			2b-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%
			2c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	4 (Skala 5)
	3	Perencanaan pembelajaran yang berkualitas tinggi	3a-N	Persentase pengembangan *Instructional System Design*	100%

Program	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)		Indikator Kinerja Utama		Target 2020
			3b-N	Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	100%
	4	Program pembelajaran yang kreatif	5a-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	50%
	5	Manajemen pengetahuan yang berkualitas	5a-N	Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC	100%
			5b-N	Indeks kualitas penelitian	90
	6	Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan	6a-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	80%
	7	Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif	7a-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4 (Skala 5)
	8	Organisasi dan SDM yang optimal	8a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	93,67%
			8b-CP	Persentase efisiensi belanja birokrasi	10%
			8c-CP	Persentase penyelesaian program RBTK	85%
			8d-CP	Indeks integritas organisasi	95,05
			8d1-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100
			8d2-CP	Indeks Persepsi Integritas	90,10
			8e-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	75 (skala 100)
	9	Pengelolaan keuangan yang optimal	9a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89%
			9b-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	85
			9c-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%
	10	Sistem manajemen informasi yang andal	10a-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	85%

Bab III:
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Renstra

Renstra BPPK tahun 2020-2024 ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2020. Oleh karena itu, dalam laporan kinerja ini masih menggunakan target berdasarkan kontrak kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2020. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Capaian target kinerja kegiatan BPPK Tahun 2020 dapat tergambarkan dalam target dan realisasi Renstra BPPK Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2020

No	Indikator	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
015.11.04	**Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara**				
	Persentase Lulusan Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya	90%	96,03%	90%	99,36%
	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya	75%	99,78%	85%	99,51%

B. Capaian Kinerja

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi guna menggambarkan tugas dan fungsi organisasi dengan proporsional adalah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan alat ukur pencapaian sasaran strategi yang telah ditetapkan suatu organisasi. Pada saat ini, sistem manajemen IKU di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari 6 tingkatan, yaitu:

1) Kemenkeu-Wide : Level Kementerian (IKU Menteri Keuangan)
2) Kemenkeu-One : Level Unit Eselon I (IKU Pimpinan Unit Eselon I)
3) Kemenkeu-Two : Level Unit Eselon II (IKU Pimpinan Unit Eselon II)
4) *Kemenkeu-Three* : Level Unit Eselon III (IKU Pimpinan Unit Eselon III)
5) Kemenkeu-Four : IKU Pimpinan Unit Eselon IV
6) *Kemenkeu-Five* : IKU Pelaksana, Staf Ahli, TP, Fungsional, Eselon V

Sebagai bentuk monitoring dari persentase capaian IKU digunakan 3 tingkatan warna indikator untuk mengklasifikasikan persentase capaian yaitu:

- warna merah untuk capaian di bawah 80
- warna kuning untuk capaian 80≤ x <100
- warna hijau untuk capaian 100≤ x ≥120

Dari 20 IKU BPPK, terdapat 5 IKU memiliki periode pelaporan triwulanan, 6 IKU memiliki periode pelaporan semesteran, dan 9 IKU memiliki periode pelaporan tahunan. Pada Tahun Anggaran 2020, keseluruhan dari 20 IKU berstatus hijau. Target, realisasi, dan capaian IKU BPPK Tahun 2020, secara rinci disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi serta Capaian IKU BPPK Tahun 2020

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target awal 2020	Target Addendum	Realisasi	Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (25%)					**110,40**
1	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien				**110,40**
1a-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	90%	99,36%	**110,40**
CUSTOMER PERSPECTIVE (15%)					**110,23**
2	Tata kelola dan sumber daya kementerian yang optimal				**110,23**
2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	85%	85%	99,51%	**117,07**
2b-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik*	93%	93%	96,12%	**103,35**
2c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	4	4	4,41	**110,25**
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)					**115,15**
3	Perencanaan pembelajaran yang berkualitas tinggi				**100**
3a-N	Persentase pengembangan *instructional system design*	100%	100%	100%	**100**
3b-N	Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	100%	100%	100%	**100**
4	Program pembelajaran yang kreatif				**120**
4a-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	50%	50%	82,52%	**120**
5	Manajemen pengetahuan yang berkualitas				**115,73**
5a-N	Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC	100%	100%	111,46%	**111,46**
5b-N	Indeks kualitas penelitian	90	90	238	**120**
6	Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan				**120**
6a-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	80%	80%	100%	**120**
7	Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif				**120**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target awal 2020	Target Addendum	Realisasi	Capaian
7a-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4	4	5	**120**
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (30%)					**112,46**
8	Organisasi dan SDM yang optimal				**113,81**
8a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	93,67%	93,67%	98%	**104,62**
8b-CP	Persentase efisiensi belanja birokrasi	10%	10%	73,87%	**120**
8c-CP	Persentase penyelesaian program RBTK	85%	85%	93,42%	**109,91**
8d-CP	Indeks integritas organisasi	95,05	95,05	108,68	**114,34**
8e-CP	Tingkat implementasi learning organization	75	75	95,59	**120**
9	Pengelolaan keuangan yang optimal				**105,92**
9a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89%	89%	92,52%	**103,96**
9b-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	85	85	94	**111,09**
9c-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	98,24%	**103,41**
10	Sistem manajemen informasi yang andal				**117,65**
10a-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	85%	85%	100%	**117,65**
NILAI KINERJA ORGANISASI					**112,42**

* terdapat *addendum* pada formula perhitungan IKU

Sedangkan, peta risiko dan tren besaran risiko tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Diagram 3.1
Peta Risiko BPPK Tahun 2020

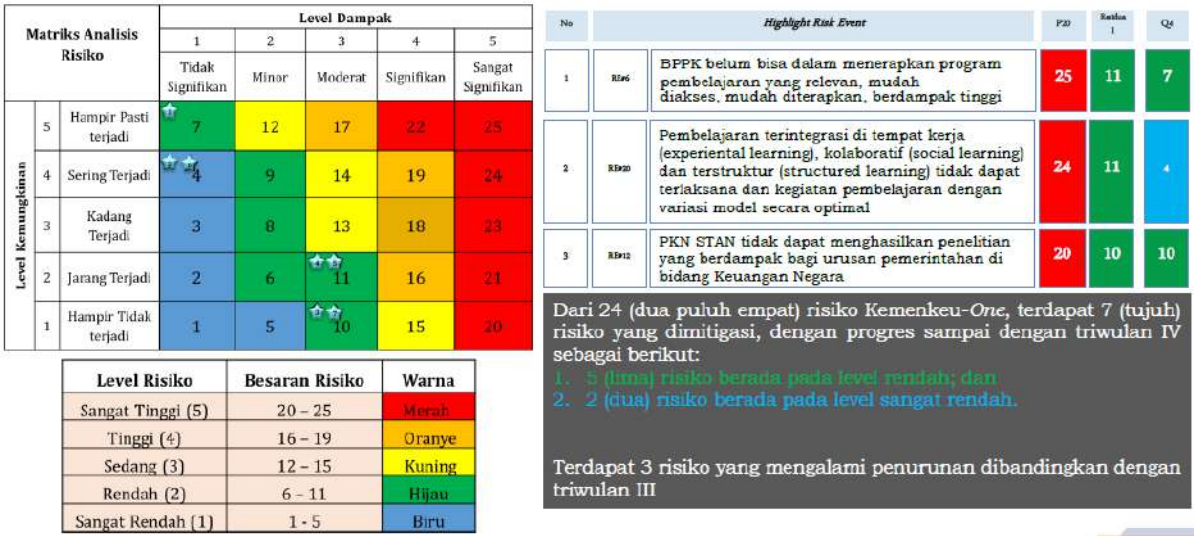

Tabel 3.3
Tren Besaran Risiko BPPK Tahun 2020

Prioritas	Nomor RE	Risk Event (RE)	P20	Resi dual	Q4
SO #1		Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			
6	RE #1	Pembelajaran belum selaras dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai dalam pencapaian kinerja	14	11	4
SO #3		Perencanaan pembelajaran yang berkualitas tinggi			
1	RE #6	BPPK belum bisa dalam menerapkan program pembelajaran yang relevan, mudah diakses, mudah diterapkan, berdampak tinggi	25	11	7
SO #4		Program pembelajaran yang kreatif			
4	RE #8	KLC belum menjadi media pembelajaran yang utama bagi pegawai Kemenkeu	17	11	11
SO #5		Manajemen pengetahuan yang berkualitas			
7	RE #10	Proses pembelajaran melalui KLC tidak dapat berjalan dengan baik	14	11	10
3	RE #12	PKN STAN tidak dapat menghasilkan penelitian yang berdampak bagi urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara	20	10	10
SO #8		Organisasi dan SDM yang optimal			
2	RE #20	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan variasi model terintegrasi di tempat kerja (experiental learning), kolaboratif (social learning) dan terstruktur (structured learning) tidak dapat terlaksana secara optimal	24	11	4
SO #9		Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal			
5	RE #23	Ketidaktercapaian Target Keluaran Belanja Negara	17	11	11

Secara rinci, ikhtisar Kinerja BPPK (Kemenkeu *One-Two-Three*) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Unit	Jumlah SS	Jumlah IKU	Status IKU				NKO
			Hijau	Kuning	Merah	Abu-abu	
BPPK	10	20	20	-	-	-	112,42
Setban	9	18	17	1	-	-	106,49
Pusdiklat PSDM	11	20	19	1	-	-	109,71
BDPim	7	12	11	1	-	-	108,79
Pusdiklat AP	11	19	17	2	-	-	109,61
Pusdiklat Pajak	10	19	18	1	-	-	109,44
Pusdiklat BC	11	19	17	2	-	-	107,69
Pusdiklat KNPK	11	19	18	1	-	-	107,66
Pusdiklat KU	10	18	17	1	-	-	110,09
PKN STAN	11	20	19	1	-	-	107,41
BDK Medan	7	13	12	1	-	-	108,20
BDK Pekanbaru	7	13	11	2	-	-	107,95
BDK Palembang	7	13	12	1	-	-	108,00
BDK Cimahi	7	13	12	1	-	-	107,07
BDK Yogyakarta	7	13	12	1	-	-	108,64
BDK Malang	7	13	12	1	-	-	108,73
BDK Denpasar	7	13	11	2	-	-	108,17

Unit	Jumlah SS	Jumlah IKU	Status IKU				NKO
			Hijau	Kuning	Merah	Abu-abu	
BDK Pontianak	7	13	12	1	-	-	109,11
BDK Balikpapan	7	13	11	2	-	-	108,22
BDK Makassar	7	13	12	1	-	-	107,24
BDK Manado	7	13	12	1	-	-	108,46

Penjelasan terkait capaian masing-masing IKU adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

Tujuan reformasi birokrasi Kemenkeu adalah membentuk organisasi yang *agile*, efektif dan efisien serta peningkatan kualitas dan perbaikan citra pelayanan publik. Untuk memenuhi kepuasan kepada pengguna layanan atau *stakeholders* dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dalam penyelenggaraan pelayanan harus berasaskan: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

1a-CP Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya

Tujuan IKU ini adalah mengukur keberhasilan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja individu. Rendahnya rasio antara alumni yang dapat dievaluasi peningkatan kinerjanya dengan alumni pelatihan disebabkan karena pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan memiliki tusi yang kurang relevan dengan tujuan pelatihan sehingga mengakibatkan penyelenggaraan pelatihan menjadi kurang efektif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPPK menentukan pelatihan dan *leading indicator* untuk dievaluasi dampaknya (level 4) bersama dengan Unit Pengguna serta memonitoring pelaksanaan pelatihan dan pengukuran melalui forum gabungan Renbangdik dan Evalapkin. Alumni pelatihan yang dievaluasi adalah alumni pelatihan yang telah lolos evaluasi Kirkpatrick sampai dengan level 3, yaitu telah mengimplementasikan materi pelatihan dan menunjukkan perubahan perilaku kerja. Alumni pelatihan yang diukur juga harus memiliki target kinerja yang terukur dan telah ditempatkan pada jabatan sesuai dengan kompetensi dari pelatihan yang diikuti.

Program pelatihan yang akan dievaluasi dan indikator yang akan dijadikan dasar penilaian kinerja ditentukan pada saat pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan/atau penyusunan kurikulum (desain pembelajaran).

Indikator keberhasilan level 4 adalah adanya peningkatan kinerja setelah pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data capaian kinerja individu atau unit sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Indikator pengukuran kinerja sebelum dan setelah pelatihan dapat mencakup waktu, kualitas, biaya, pendapatan, hasil pekerjaan, dan lain-lain.

Pengukuran dilakukan antara lain dengan mengevaluasi capaian *leading indicators, desired result*, *isolasi/group control, trend lines* dan penilaian dari atasan. Evaluasi dilakukan 3-6 bulan bulan setelah pegawai selesai mengikuti pelatihan. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Formula:

$$\frac{\text{Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya}}{\text{Jumlah Alumni Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Kualitas Perilaku Kerja}} \times 100\%$$

Realisasi IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya tahun 2020 adalah 99,36% dari target 90%, dengan rincian sebagai berikut :

BPPK 1a-CP	SS: Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien							
	IKU: Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	90%	90%	-	90%	90%	90%	Max/TLKV
Realisasi	N/A	99,34%	99,34%	N/A	99,34%	99,36%	99,36%	
Capaian	N/A	110,38	110,38	N/A	110,38	110,40	110,40	

Jumlah program pelatihan yang diukur dampaknya mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun 2019 (23 program), namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 (12 program). Kondisi pandemi COVID-19 mempengaruhi komposisi pelatihan yang dapat dilakukan evaluasi level 4 di tahun 2020. Akibatnya, dari 24 program pelatihan yang direncanakan, hanya 18 program yang pada akhirnya dapat diukur dampaknya. Namun demikian, jika dilihat dari segi jumlah alumni yang menjadi objek evaluasi, terjadi peningkatan jumlah dari 629 alumni (tahun 2019) menjadi 1.244 alumni (tahun 2020). Dari 1.244 alumni yang menjadi objek evaluasi tersebut, 1.236 (99,36%) diantaranya menunjukkan peningkatan kinerja, dengan rincian:

No.	Pusdiklat	Program	Objek Epaspem	Alumni dg Peningkatan Kinerja	%
1	Pusdiklat PSDM	Pelatihan *Communication Skills*	174	174	100
2	Pusdiklat PSDM	Pelatihan *Excellent Frontliners*	95	95	100
3	Pusdiklat PSDM	Pelatihan *Effective Negotiation Skills*	59	59	100
4	Pusdiklat PSDM	Pelatihan MSDM Tingkat Dasar	16	16	100
5	Pusdiklat PSDM	Pelatihan Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan	7	7	100
6	Pusdiklat PSDM	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Eselon IV	143	142	99,30
7	Pusdiklat PSDM	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pelaksana	33	33	100
8	Pusdiklat PSDM	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Bagi Pejabat Pengawas	15	15	100
9	Pusdiklat PSDM	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Bagi Pejabat Administrator	18	18	100
10	Pusdiklat PSDM	Pelatihan Dasar CPNS Gol.II Periode I	544	543	99,82
11	Pusdiklat AP	Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen	17	16	94,12
12	Pusdiklat AP	Pelatihan Staf PPK	18	18	100
13	Pusdiklat BC	Pelatihan Teknis Layanan Informasi (*blended learning*)	21	20	95,24
14	Pusdiklat BC	Pelatihan Teknis Kepatuhan Internal (*blended learning*)	10	9	90
15	Pusdiklat Pajak	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis Angkatan I	25	24	96
16	Pusdiklat KNPK	Pelatihan Penguasaan Metode dan Analisis Tingkat Lanjutan untuk Jafung AKPD	6	6	100
17	Pusdiklat KNPK	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama	15	13	86,67
18	Pusdiklat KU	Pelatihan Penyusunan Materi Pembelajaran Berbasis Multimedia	28	28	100
BPPK			**1.244**	**1.236**	**99,36**

Capaian tersebut mengimplikasikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2020 telah mampu mendorong peningkatan kinerja pegawai. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, terdapat peningkatan capaian dari 106,69 (tahun 2019) menjadi 110,40 (tahun 2020).

Isu Utama dan Implikasi		
Isu Utama 1. Terdapat 18 Program Pelatihan yang di Epaspemkan tahun 2020 2. Dari 1.244 alumni yang diukur Epaspem s.d. Level 4, 1.236 alumni pelatihan meningkat kinerjanya (99,36%) 3. Covid-19 membuat perubahan komposisi pelatihan yang di Epaspemkan di Semester II 2020 **Implikasi** Semakin sedikitnya jumlah program dan peserta yang dapat diukur evaluasi pascapembelajarannya. 1. Total target Epaspem di awal tahun: 24 Program. 2. Total yang dapat dilakukan tahun 2020: 18 program pelatihan 3. Terdapat 5 epaspem yang ditunda ke semester I 2021, 3 epaspem batal, dan 2 epaspem baru		
Akar Masalah		
Penundaan/pembatalan pelatihan pada Semester I tahun 2020 (terdampak COVID-19) mengakibatkan tidak dapat dilakukannya proses evaluasi pascapembelajaran di beberapa pelatihan pada periode Semester II tahun 2020		
Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
1. Kegiatan evaluasi pascapembelajaran dan penyusunan laporan semester I 2020 sebanyak 12 program pelatihan 2. Kegiatan evaluasi pascapembelajaran dan penyusunan laporan semester II 2020 sebanyak 6 program pelatihan		
Rekomendasi Rencana Aksi	**Penanggung jawab**	**Periode**
Proses Epaspem Level 4 untuk pelatihan yang telah diselenggarakan di Semester II tahun 2020	Pusdiklat dan BDK yang terlibat	Semester I tahun 2021

Indikator kinerja ini juga telah dilekatkan dengan manajemen risiko dimana telah diidentifikasi risiko pada lingkungan BPPK yaitu “Pembelajaran belum selaras dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai dalam pencapaian kinerja”, sebagaimana berikut:

Proyeksi Risiko
Risiko ini akan di *refine* dalam hal penyebab, data-data dalam penentuan Level Kemungkinan, Level Dampak, dan Indikator Risiko Utama (IRU), sampai dengan rencana mitigasinya, mengingat risiko ini adalah salah satu risiko yang masuk pada profil risiko Kemenkeu-*wide*

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan
1. Penyesuaian target IKU pelatihan yang akan dievaluasi level 3 dan level 4 pada bulan Maret 2020 2. Pelaksanaan tahapan persiapan dan penyusunan instrument evaluasi pascapembelajaran oleh Pusdiklat pada triwulan I dan triwulan III 3. Penyusunan dan penyampaian laporan epaspem Semester I dan semester II oleh Pusdiklat 4. Pelaksanaan 6 pelatihan yang akan diukur epaspemnya di Semester 2 5. Pelaksanaan harmonisasi AKP 2021 6. Pelaksanaan *elearning* Pengenalan evaluasi pascapembelajaran

Rekomendasi
Akan tetap diidentifikasi pada profil risiko 2021, di *refine* mengenai penyebab, data-data dalam penentuan Level Kemungkinan, Level Dampak, dan Indikator Risiko Utama (IRU), sampai dengan rencana mitigasinya.

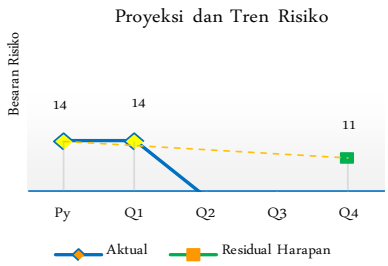

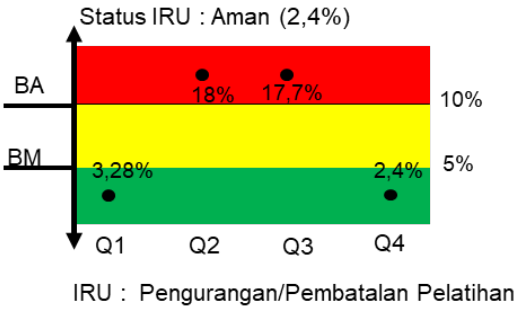

2. Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal

Tata kelola Kementerian yang optimal adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparan, partisipatif dan akuntabel) sehingga mampu meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Sedangkan, sumber daya Kementerian yang optimal adalah SDM yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien sesuai target yang ditetapkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

2a-N Persentase Alumni Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Kualitas Perilaku Kerja

IKU ini merupakan hasil dari Evaluasi Kirkpatrick Level 3 (*Behavior*). IKU ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh para alumni dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK. Data diperoleh melalui kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran atas program-program pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh Pusdiklat serta disepakati dengan unit pengguna.

Program pelatihan yang akan dievaluasi ditentukan pada saat pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan/atau penyusunan kurikulum (desain pembelajaran). Responden dalam kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran adalah alumni pelatihan, atasan, rekan kerja, bawahan (jika ada) dengan menggunakan metode survei 360°. Responden yang datanya digunakan dalam perhitungan secara 360° adalah apabila jumlah tanggapan responden atas seorang alumni pelatihan minimal memenuhi 50% dari jumlah responden yang disurvei.

Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran dilakukan pada alumni yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi standar kompetensi yang ingin dicapai pada Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta;
b. berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri untuk mengimplementasikan materi pembelajaran; dan
c. melaksanakan tugas yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diikuti.

Alumni yang memenuhi standar kompetensi pada Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta adalah apabila alumni tersebut berhasil lulus ujian dengan nilai minimal baik atau berhasil mendapat peningkatan nilai dalam *pre-test* dan *post-test*.

Alumni yang berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri adalah apabila alumni tersebut mendapatkan nilai rata-rata minimal 3,40 (dengan skala interval 1-5) atas seluruh pertanyaan yang menggunakan skala berdasarkan form Asesmen Mandiri (Kepercayaan Diri, Komitmen, dan Perilaku) sesuai dengan PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Alumni yang melaksanakan tugas sesuai dengan materi pembelajaran dibuktikan berdasarkan hasil rekapitulasi dari jawaban responden atas alumni tersebut atau berdasarkan data tugas dan fungsi dari unit kerja alumni.

Indikator keberhasilan dalam IKU ini adalah adanya peningkatan kualitas perilaku kerja alumni pelatihan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengolahan

data atas persepsi responden terhadap diri alumni antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan yang menunjukkan adanya peningkatan. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Formula:

Kualitas Perilaku Kerja Alumni x = Rata-rata dari (Rata-rata dari jawaban alumni x; Rata-rata dari jawaban atasan alumni x; Rata-rata dari jawaban rekan kerja alumni x; Rata-rata dari jawaban bawahan alumni x.)

Realisasi IKU = Jumlah Alumni Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Kualitas Perilaku Kerja / Jumlah Alumni Pelatihan yang Diukur dalam Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran x 100

Untuk IKU ini, capaiannya adalah sebagai berikut:

BPPK 2a-N	SS: Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal IKU: Persentase Alumni Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Kualitas Perilaku Kerja							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	85%	85%	-	85%	85%	85%	Max/TLKV
Realisasi	N/A	99,80%	99,80%	N/A	99,80%	99,51%	99,51%	
Capaian	N/A	117,41	117,41	N/A	117,41	117,07	117,07	

Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama

1. Dari 2.436 alumni pelatihan yang diukur peningkatan kualitas perilaku kerjanya, 2.424 alumni mengalami peningkatan kualitas perilaku kerja (99,51%)
2. Pelatihan yang direncanakan dievaluasi pascapembelajaran pada periode semester II tahun 2020 sebagian tidak dapat dilaksanakan.

Implikasi

Semakin sedikitnya jumlah program dan peserta yang dapat diukur evaluasi pascapembelajarannya

Akar Masalah		
Penundaan/pembatalan pelatihan pada Semester I tahun 2020 (terdampak COVID-19) mengakibatkan tidak dapat dilakukannya proses evaluasi pascapembelajaran pada periode Semester II tahun 2020.		
Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
1. Kegiatan Epaspem dan penyusunan laporan Epaspem Semester I 2020 2. Kegiatan Epaspem dan penyusunan laporan Epaspem Semester II 2020		
Rekomendasi Rencana Aksi	**Penanggung jawab**	**Periode**
Proses Epaspem Level 3 untuk pelatihan yang diselenggarakan Semester II tahun 2020	Pusdiklat dan BDK yang terlibat	Semester I tahun 2021

2b-N Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal Baik

Lulusan berpredikat minimal baik adalah:

1. Lulusan pelatihan teknis yang memperoleh nilai minimal 76 pada evaluasi pertama
2. Lulusan pelatihan fungsional yang memperoleh nilai minimal 76 pada evaluasi pertama
3. Lulusan pelatihan dasar dan kepemimpinan yang memperoleh nilai minimal 76 pada evaluasi pertama (bukan peserta mengulang)
4. Lulusan program diploma yang memperoleh IPK minimal 3 (predikat sangat memuaskan ipk 3-3.5)
5. Lulusan program *pre-departure training* yang memperoleh nilai IBT minimal 79 atau IELTS 6,5

Pembagi dalam IKU ini adalah seluruh peserta pendidikan dan pelatihan yang mengikuti ujian. IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atas SDM yang kompeten. IKU ini bermanfaat dalam memberikan umpan balik kepada BPPK untuk memperbaiki proses pembelajaran pada setiap lini. Formulanya adalah:

Formula:	
$\frac{\text{Jumlah peserta/mahasiswa yang lulus ujian dengan predikat minimal baik}}{\text{Jumlah peserta yang mengikuti ujian/jumlah mahasiswa semester akhir}}$	x 100%

IKU ini mengalami *addendum* dalam hal formulasinya karena selama masa pandemi banyak pelatihan yang harus dikonversi menjadi *e-learning*. Berikut adalah formulasinya:

Formula:

a. **Pelatihan tatap muka dengan kelulusan:**

$$\frac{\text{Jumlah peserta tatap muka yang lulus ujian dengan predikat minimal baik}}{\text{Jumlah peserta tatap muka yang mengikuti ujian}} \times 100\%$$

b. **Pelatihan *e-learning* dengan kelulusan:**

$$\frac{\text{Jumlah peserta } e\text{-}learning \text{ yang lulus ujian dengan predikat minimal baik}}{\text{Jumlah peserta } e\text{-}learning \text{ yang mengikuti ujian}} \times 100\%$$

Realisasi = (70% x a) + (30% x b)

jika salah satu komponen tidak ada, maka 100% di komponen yang ada

Capaian IKU Tahun 2020 dengan formulasi sebelum *addendum* adalah sebagai berikut:

BPPK 2b-N	SS: Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal							
	IKU: Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/ KP**
Target	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	Max / T LKV
Realisasi	88,21%	84,82%	84,82%	91,95%	91,95%	92,67%	92,67%	
Capaian	94,85	91,90	91,90	98,87	98,87	99,65	99,65	

Sedangkan capaian IKU Tahun 2020 setelah reformulasi adalah sebagai berikut:

BPPK 2b-N	SS: Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal IKU: Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/ KP**
Target	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	Max / TL KV
Realisasi	88,21%	91,75%	91,75%	95,62%	95,62%	96,12%	96,12%	
Capaian	94,85	98,66	98,66	102,82	102,82	103,35	103,35	

Isu Utama dan Implikasi

Pada tahun 2020 terdapat:

1. 8.165 peserta yang mengikuti Ujian tatap muka, dengan 8.007 peserta tatap muka lulus dengan nilai minimal baik (98,06%) dan
2. 40.986 peserta ujian *elearning*, dengan 37.541 peserta *elearning* lulusan dengan minimal baik (91,59%).

Sehingga persentase lulusan minimal baik menjadi 96,12%.

Peserta yang tidak lulus dan lulus dengan nilai di bawah baik sebagian besar berasal dari non-Kemenkeu dan pelatihan *e-learning*.

Akar Masalah

Pelatihan *e-learning* masuk kedalam perhitungan lulusan Pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik, tetapi belum ada *baseline* perhitungan lulusan minimal baik untuk *e-learning* karena selama ini lebih dominan tatap muka.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Penyusunan kerangka naskah soal (KNS)
2. Validasi soal sebelum pelaksanaan ujian
3. Perubahan formula IKU dengan memberikan bobot 70% pelatihan tatap muka dan 30% pelatihan *elearning*

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Penyusunan KNS dan validasi soal sebelum pelaksanaan ujian 2. Menentukan metode evaluasi peserta yang paling tepat dilakukan untuk setiap pelatihan, terutama e-learning dan PJJ	Seluruh Pusdiklat	Sepanjang tahun 2021

Unit di BPPK yang belum memenuhi target yaitu Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Capaian IKU Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik untuk Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

Pusdiklat AP	**SS: Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal**							
	IKU: Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	Max/TLKV
Realisasi	76, 25%	82,53%	82,53%	85,48%	85,48%	85,80%	85,80%	
Capaian	81,99	88,74	88,74	91,91	91,91	92,26	92,26	

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

a. Kendali atas tingkat kelulusan kecil karena pembelajaran dilakukan secara e-*learning*.
b. Terdapat peserta dari K/L yang tidak menyelesaikan pelatihan sampai dengan selesai.

2c-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan BPPK terhadap pihak eksternal. Lingkup survei adalah pengguna eksternal atas pelayanan unggulan BPPK. IKU ini diukur atas layanan unggulan yang diberikan oleh Pusdiklat, PKN STAN dan BDK yang diperoleh dari survei independen yang yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta bekerjasama dengan Tim Peneliti independen. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unggulan BPPK dengan formula:

Formula:
Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan

Untuk IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, capaian dihitung tahunan dengan rincian sebagai berikut:

BPPK 2c-N	SS: Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal							
	IKU: Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4	4	Max/ TLKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,41	4,41	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110,25	110,25	

Isu Utama dan Implikasi

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ini merupakan Survei atas 2 layanan yaitu:
   a) Pelatihan tatap muka dengan indeks kepuasan 4,43
   b) Pelatihan *e-learning* dengan indeks kepuasan 4,39
   c) Agregat BPPK: 4,41
2. Survei dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal dengan Tim Peneliti baru dari UNPAD
3. Metode survey yang digunakan adalah ASCI & Delphi

Akar Masalah

COVID-19 meyebabkan pembatalan/penundaan pelatihan tatap muka, penundaan proses seleksi program pascasarjana, dan penundaan SPMB PKN STAN. Sehingga layanan BPPK yang diukur pada tahun 2020 hanya pelatihan tatap muka dan *e-learning*

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Saat ini sudah dilakukan tahapan pengumpulan SOP
2. 13 April 2020 dilakukan *video conference* dengan tim peneliti dari UNPAD dan Organta
3. Pada bulan Mei, terdapat 2 kali pertemuan untuk menentukan metode survey dan rencana penyusunan kuisioner
4. Penyusunan dan Finalisasi Kuisioner
5. Survey berlangsung 23 Agustus s.d. 31 Oktober 2020

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Mempertahankan dan meningkatkan layanan penyelenggaraan pelatihan BPPK	Pusdiklat dan BDK	Tahun 2021

3. Perencanaan Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi

Perencanaan Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi adalah perumusan rencana pengembangan kompetensi pegawai yang selaras dengan kriteria pembelajaran Corpu, yaitu *Relevant*, *Accessible*, *Impactful* dan *Applicable* serta sesuai dengan pedoman pembelajaran yang berlaku.

3.a-N Persentase Pengembangan *Instructional System Design (ISD)*

ISD yang dimaksud dalam IKU ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nomor: PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu meliputi:

- **Kerangka Acuan Program (KAP)** Pembelajaran yaitu informasi program pembelajaran yang memuat deskripsi singkat, standar kompetensi, kompetensi dasar, lama pembelajaran efektif, daftar mata pelajaran, jenjang, persyaratan peserta, kualifikasi fasilitator, bentuk evaluasi, dan akomodasi.
- **Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)** yaitu pokok-pokok pembelajaran dari suatu mata pelajaran yang disusun secara sistemik dan mencakup nama program pembelajaran, nama mata pelajaran, jumlah jam pembelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok/sub materi pokok, metode dan media serta sumber bahan.
- **Satuan Acara Pembelajaran (SAP)** yaitu rincian pembelajaran untuk lingkup satu atau beberapa kali pertemuan yang disusun secara sistematik dan mencakup nama program pembelajaran, nama mata pelajaran, jumlah jam pembelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok/sub materi pokok, metode dan media, sumber bahan, tahapan kegiatan Pembelajaran serta evaluasi pembelajaran.
- **Kerangka Naskah Soal (KNS)** yaitu suatu dokumen yang memuat informasi mengenai komposisi, bentuk, dan jumlah soal yang akan digunakan dalam menyusun Rancangan Naskah Soal menurut ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengenai pedoman penyusunan soal dan validasi soal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Jumlah program yang dimaksud dalam IKU ini adalah :

a. seluruh program pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2019;
b. belum memiliki ISD/mengalami perubahan kurikulum.

Program tersebut dikatakan telah lengkap ISD-nya apabila:

a. Untuk pelatihan hasil AKP reguler, wajib tersedia : KAP, GBPP, SAP, dan KNS;
b. Untuk pelatihan hasil AKP insidental di tengah tahun, paling kurang tersedia : KAP

c. Untuk pelatihan *e-learning*, seminar, kursus, penataran, lokakarya/*workshop* paling kurang tersedia: KAP

Formula untuk mengukur capaian IKU ini adalah:

Formula:
$\frac{\text{Jumlah program dengan ISD lengkap}}{\text{Jumlah program}} \times 100\%$

IKU ini bertujuan untuk memastikan agar program-program pembelajaran yang diselenggarakan BPPK memiliki struktur desain pembelajaran yang jelas dan mengarah kepada pencapaian kompetensi khususnya dalam mewujudkan Kementerian Keuangan *Corporate University*. Capaian IKU ini untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BPPK 3a-N	**SS: Perencanaan Pembelajaran yang Berkuaitas Tinggi**							
	IKU: Persentase pengembangan *Instructional System Design*							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	10%	35%	35%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLKV
Realisasi	55,10%	70,60%	70,60%	95,18 %	95,18%	100%	100%	
Capaian	**120**	120	120	120	120	100	100	

Isu Utama dan Implikasi
Total 596 program, telah lengkap diselesaikan *instructional system designnya* pada triwulan IV tahun 2020.
Akar Masalah
COVID-19 meyebabkan beberapa program pelatihan dikonversi menjadi *e-learning* atau pelatihan jarak jauh. Hal ini dapat mengganggu penyelesaian ISD yang sudah direncanakan di awal tahun karena terdapat banyak pelatihan yang dikonversi menjadi PJJ. Perubahan kalender pembelajaran yang sangat dinamis jug mengganggu realisasi ISD di beberapa Pusdiklat.
Tindakan yang Telah Dilaksanakan
1. Penyusunan dan pengembangan desain pembelajaran sesuai dengan *instructional system design* berasama dengan Widyaiswara dan Unit Eselon I terkait. 2. Input deskripsi pelatihan pada aplikasi Semantik. 3. Proses konversi pelatihan tatap muka menjadi PJJ.

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Penyusunan dan pengembangan desain pembelajaran sesuai dengan ISD 2. Input deskripsi pelatihan pada aplikasi Semantik	Pusdiklat	Sepanjang tahun 2021

Indikator kinerja ini juga telah dilekatkan dengan manajemen risiko dimana telah diidentifikasi risiko pada lingkungan BPPK yaitu "BPPK belum bisa menerapkan program pembelajaran yang relevan, mudah diakses, mudah diterapkan, berdampak tinggi" sebagai berikut:

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan
1. Pemantauan keseuaian LoC dengan realisasi pengiriman peserta pelatihan 2. Penyelenggaraan pertemuan berkala (misalnya: Forum Renbang, Forum Penyelenggaraan, Forum Evalap) 3. Pelaporan epaspem Semester I dan Semester II 4. Pelaksanaan harmoni AKP 2021 pada bulan September 2020 5. Pelaksanaan validasi program sebanyak 2 kali dalam tahun 2020 6. Realisasi pengembangan ISD telah tercapai 100%

Rekomendasi
1. *Refinement* terhadap *risk event*, penyebab, dan dampak. 2. Penajaman pada level kemungkinan dan level dampak. 3. Dalam hal diperlukan penanganan akan dirumuskan indikator risiko utama (IRU) dan rencana mitigasinya

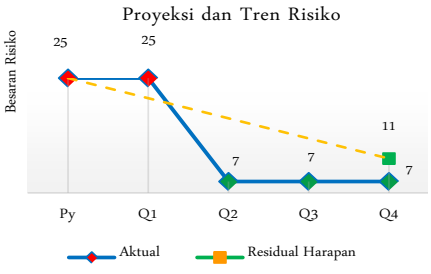

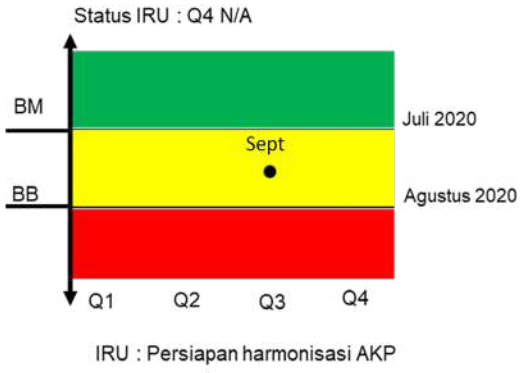

3b-N Persentase Program Pelatihan yang Mendapatkan Nilai Validasi A

Program pelatihan adalah serangkaian materi, metode dan media yang dihasilkan dari proses penyusunan desain pembelajaran yang didasarkan pada hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I.

Validasi pelatihan adalah pengesahan terhadap kesesuaian antara penyelenggaraan pelatihan dan materi pelatihan dengan kebutuhan peserta pelatihan dan tujuan diadakannya pelatihan tersebut. Program pelatihan yang divalidasi adalah Program pelatihan hasil rancangan Pusdiklat.Program pelatihan yang mendapat nilai validasi A adalah jika nilai tiap komponen mendapatkan nilai minimal 4, dan tidak ada variabel yang mendapat nilai kurang dari 3 dan dinyatakan tervalidasi baik sekali.

Kategori Penilaian berdasarkan hasil penilaian Tim Validasi Program pelatihan. Tim Validasi Program Pelatihan terdiri dari pihak internal dan eksternal BPPK . Validasi yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nomor: Per-6/PP/2011 tentang Pedoman Validasi Program Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelatihan yang diselenggarakan. Kualitas suatu pelatihan dapat dilihat dari tingkat efektivitas pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dalam menutup kesenjangan kompetensi teknis tertentu. IKU ini bermanfaat untuk menjadi dasar dalam *capacity building* bagi SDM perancang pelatihan maupun dasar perbaikan sistem dan mekanisme perancangan pelatihan di BPPK. Adapun Formula untuk mengukur capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah program pelatihan yang mendapat nilai validasi A}}{\text{Jumlah program pelatihan yang divalidasi}} \times 100\%$$

Capaian IKU ini tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BPPK 3b-N	SS: Perencanaan Pembelajaran yang Berkuaitas Tinggi							
	IKU: Persentase pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	Max / TLKV
Realisasi	N/A	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	
Capaian	N/A	100	100	N/A	100	100	100	

Isu Utama dan Implikasi		
1. Sampai dengan Semester I 2020, terdapat 127 program pelatihan dan 127 program tersebut telah mendapatkan validasi A. 2. Sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat 193 program pelatihan dan 193 program tersebut telah mendapatkan validasi A.		
Akar Masalah		
1. Pelatihan yang divalidasi banyak mengalami perubahan karena WFH 2. Pelaksanaan WFH akibat COVID-19 menyebabkan perlu dilakukannya mekanisme penilaian eksternal yang berbeda dengan tahun sebelumnya (jarak jauh)		
Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
1. Proses Validasi Program Semester I dan II tahun 2020 yang masing-masing terdiri dari 2 termin 2. Proses validasi semester II 2020 dilakukan dengan metode jarak jauh		
Rekomendasi Rencana Aksi	**Penanggung jawab**	**Periode**
Proses validasi program Semester I tahun 2021	Pusdiklat, Sekretariat Badan (Bagian OTL)	Semester I 2021

4. Program Pembelajaran yang Kreatif

Program pembelajaran yang kreatif adalah proses pembelajaran yang didesain dan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta pelatihan untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta pelatihan.

4a-N Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital

Program pelatihan yang diselenggarakan BPPK terdiri dari program pelatihan klasikal (*full* tatap muka), *blended learning,* dan *fully e-learning*. Jumlah program mengacu pada kalender pelatihan terbaru.

Program *e-learning* yang dimaksud dalam IKU ini adalah seluruh program pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK secara *fully e-learning*, termasuk *microlearning*, sepanjang tahun 2020. Peserta pelatihan adalah seluruh peserta pelatihan sepanjang tahun 2020 yang berasal dari Kementerian Keuangan. Peserta program *e-learning* adalah seluruh peserta dari Kementerian Keuangan yang menyelesaikan program *fully e-learning*.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur kesiapan BPPK dalam mendukung transformasi digital Kementerian Keuangan serta tingkat aksesibilitas dan cakupan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK. Formula untuk mengukur capaian IKU ini sebagai berikut:

Formula:

Realisasi = $\frac{jumlah\ program\ e\text{-}learning\ yang\ diselenggarakan}{jumlah\ seluruh\ program\ \ yang\ diselenggarakan}$ x 60% +

$\frac{jumlah\ peserta\ program\ e\text{-}learning\ yang\ diselenggarakan}{jumlah\ seluruh\ peserta\ pelatihan}$ x 40%

Capaian IKU ini pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BPPK 4a-N	SS: Program Pembelajaran yang Kreatif							
	IKU: Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol /KP
Target	-	19,25%	19,25%	-	19,25%	50%	50%	Max/ TLKV
Realisasi	N/A	39,89%	39,89%	67,17%	67,17%	82,52%	82,52%	
Capaian	N/A	120	120	N/A	120	120	120	

Isu Utama dan Implikasi

Implementasi pembelajaran digital (*e-learning, microlearning,* dan PJJ) sebanyak 546 program dan 422.669 peserta pada tahun 2020.

Kebijakan *Open Accesses E-learning* dan konversi pelatihan tatap muka menjadi PJJ dapat meningkatkan jumlah peserta *e-learning.*

Akar Masalah

Kondisi WFH dan dampak Covid-19 ini menyebabkan terdapat banyak konversi pelatihan tatap muka menjadi *e-learning* atau PJJ atau pengunduran/pembatalan pelatihan.
Hal ini menyebabkan kalender pembelajaran menjadi dinamis dan mengalami beberapa kali revisi.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Penyusunan *e-learning* oleh Pusdiklat baik dengan Widyaiswara ataupun pihak ketiga
2. Penyelenggaraan *e-learning*
3. Setiap Pusdiklat mulai 1 April 2020 mulai menyelenggarakan *e-learning open access*
4. Pembahasan kurikulum dan konversi pelatihan ke *e-learning* dan/atau PJJ

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Penyusunan desain pembelajaran dan materi multimedia 2. Pelaksanaan *e-learning/PJJ*	Pusdilkat	Tahun 2021

Indikator kinerja ini juga telah dilekatkan dengan manajemen risiko dimana telah diidentifikasi risiko pada lingkungan BPPK yaitu "KLC belum menjadi media pembelajaran yang utama bagi pegawai Kementerian Keuangan" sebagai berikut:

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan
1. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran digital 2. Penambahan metode evaluasi dengan kuesioner pada KLC 3. Pelaksanaan sosialisasi PMK Manajemen Pengetahuan kepada perwakilan unit eselon I 4. Pemantauan data tingkat kelulusan ujian antara pelatihan klasikal dengan *e-learning* telah dilakukan dalam pelaporan kinerja triwulanan 5. Adanya KLC *Mobile*

Rekomendasi
1. *Refinement* terhadap *risk event*, penyebab, dan dampak. 2. Penajaman pada level kemungkinan dan level dampak. 3. Dalam hal diperlukan penanganan akan dirumuskan indikator risiko utama (IRU) dan rencana mitigasinya

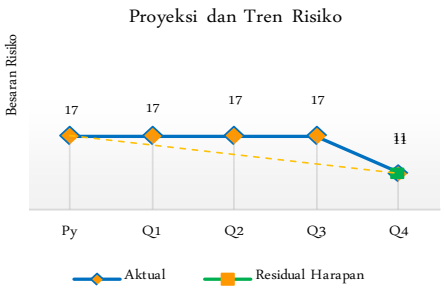

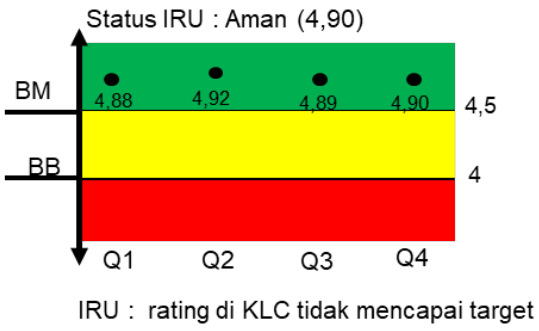

5. Manajemen Pengetahuan yang Berkualitas

Manajemen pengetahuan yang berkualitas adalah penerapan kebijakan dan praktik pengelolaan pengetahuan melalui kegiatan identifikasi, dokumentasi, organisasi, penyimpanan, distribusi, dan penerapan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka penguatan kelembagaan.

5.a-N Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada *Platform* Kemenkeu *Learning Center*

Kemenkeu Learning Center (KLC) merupakan media pembelajaran *online* yang berisi berbagai materi tentang pengelolaan Keuangan Negara yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat umum. KLC dapat diakses melalui laman http;//klc.kemenkeu.go.id. *Knowledge* yang diukur pemanfaatannya dalam IKU ini adalah seluruh materi/*knowledge document* yang ada pada menu *knowledge center.* IKU ini diukur melalui tiga aspek, yaitu efektivitas pengelolaan *Community of Practice, user engagement*, dan kualitas konten sebagai berikut:

- **Pengelolaan *Community of Practice* (CoP)** diukur berdasarkan jumlah *lesson learned* dari CoP yang aktif dikelola oleh BPPK. CoP dikatakan aktif apabila memiliki setidaknya satu dokumentasi *lesson learned* yang diunggah ke KLC. Target untuk setiap Pusdiklat adalah 10 *lesson learned* dari 3 CoP aktif.
- ***User engagement***, diukur berdasarkan *bounce rate* KLC dan jumlah *unique pageviews*.
- **Kualitas konten** diukur berdasarkan rata-rata rating yang diberikan oleh pengunjung terhadap konten yang ada di menu *knowledge center* yang telah mendapatkan penilaian/rating minimal 30 kali.

IKU ini bertujuan mengukur tingkat pemanfaatan *knowledge document*/materi pembelajaran di Bidang Keuangan Negara pada KLC, yang dihitung dengan formula:

Formula:

a. Pengelola CoP= rata-rata indeks Pengelolaan CoP di Pusdiklat

Indeks	Uraian (untuk tiap Pusdiklat)
110	>5 lesson learned dari 3 CoP
100	5 lesson learned dari 3 CoP
95	4 lesson learned dari 3 CoP
90	4 lesson learned dari 2 CoP
85	2-3 lesson learned dari 3 CoP
80	2-3 lesson learned dari 2 CoP
70	1-2 lesson learned
0	tidak terdapat dokumentasi lesson learned

b. *Bounce rate* $= \{1 + \left(1 - \frac{realisasi\ bounce\ rate}{30\%}\right)\} x\ 100\%$

c. *Unique pageview* atas konten *knowledge center* $= \frac{\textbf{jumlah } \boldsymbol{unique\ pageview}}{\mathbf{198,750}}$

d. Kualitas konten $= \frac{\textbf{Rata} - \textbf{rata rating } \boldsymbol{knowlwedge\ document}}{\mathbf{4}}$

Formula:
Formula IKU = (20% x a) + (10% x b) + (30% x c) + (40% x d)

Capaian IKU ini tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BPPK 5a-N	**SS: Manajemen Pengetahuan yang Berkualitas**							
	IKU: Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol /KP**
Target	20%	35%	35%	70%	70%	100%	100%	Max/ TL KV
Realisasi	92,39%	104,65%	104,65%	111,41%	111,41%	111,46%	111,46%	
Capaian	120	120	120	120	120	111,46	111,46	

Isu Utama dan Implikasi
Pengukuran IKU ini terdiri atas 4 komponen: 1. *CoP* (20%) Capaian 107%. 2. *Uniqe page view (30%)* Realisasi = 2.220.511 target 198.750; Capaian: 120%. Kegiatan WFH dan *Open Access* menyebabkan banyaknya jumlah akses ke KLC. 3. *Bounce rate (10%)* Realisasi 41,62% Target= 30% (*minimize*); Capaian: 61,27% 4. *Rating* (40%) Realisasi: 4,90 Target: 4; Capaian: 120.
Akar Masalah
Dampak Covid-19 dan WFH ini menyebabkan semakin banyak diaksesnya KLC, sehingga terdapat potensi melambatnya akses ke KLC.
Tindakan yang Telah Dilaksanakan
1. Sosialisasi atas video *knowledge capture* dalam KLC. 2. Penggunaan video *knowledge capture* dalam proses pembelajaran

Rekomendasi Rencana Aksi	**PIC**	**Periode**
1. Pengelolaan CoP 2. Penggunaan *video knowledge capture* dalam proses pembelajaran 3. Sosialisasi atas video *knowledge capture* dalam KLC	Pusdiklat	Tahun 2021

Indikator kinerja ini juga telah dilekatkan dengan manajemen risiko dimana telah diidentifikasi risiko pada lingkungan BPPK yaitu “Proses pembelajaran melalui KLC tidak dapat berjalan dengan baik” sebagai berikut:

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan
1. Telah dilakukan penyusunan proses bisnis KLC gen 2 sebagai KMS 2. Telah disusun *mock up user interface* KLC gen 2 sesuai PMK 226 tahun 2019 3. Telah dilakukan *public sounding* dengan seluruh UE1 di Kemenkeu untuk membahas KLC sebagai KMS 4. Penyusunan Keputusan Kepala BPPK tentang Pembentukan Tim Penguatan Tugas (Task Force) Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 5. Probis KM BPPK telah ditetapkan (KMK 158/KMK.01/2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan) 6. Pengembangan fitur evaluasi untuk e-learning di KLC dan penggabungan fitur evaluasi e-learning (blended) dari KLC ke Semantik 7. Penyampaian KEP-118/PP/2020 tentang Pendokumentasian Pengetahuan di Lingkungan BPPK ke seluruh UE1

Rekomendasi
Risiko akan diidentifikasi kembali di profil tahun 2021, mengingat KLC merupakan *backbone* dalam penyelenggaraan pembelajaran dan mendukung budaya belajar di Kemenkeu.

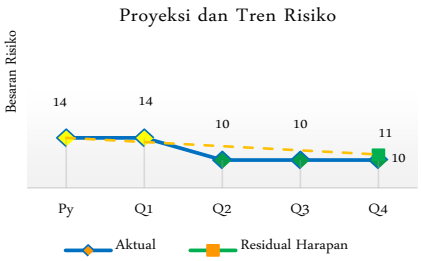

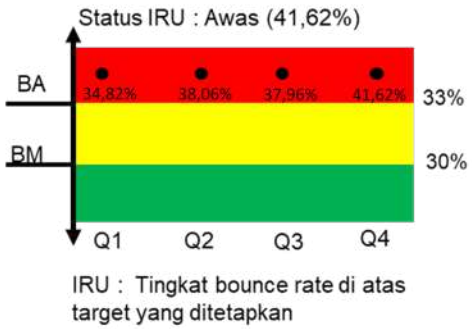

5b-N Indeks Kualitas Penelitian

Riset atau penelitian dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi

penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Indeks kualitas penelitian adalah nilai seluruh penelitian PKN STAN yang terpublikasi pada tahun 2020 berdasarkan bobot/formula yang ada di bawah.

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelatihan yang didesain dan diselenggarakan oleh BPPK untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan. Adapun Formula untuk mengukur capaian IKU ini adalah:

Formula:	
Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi tinggi (*scopus, thomson, & Microsoft Academic Search)*	7
Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sedang (DOAJ, *Ebsco, Proquest* atau sejenisnya)	5
Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi Dikti	3
Penelitian dipublikasikan di prosiding terindeks *scopus*	2
Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang memiliki ISSN	1
Penelitian diseminarkan dengan melibatkan pihak eksternal	0,5

Capaian IKU pada Indeks kualitas penelitian dihitung secara tahunan dengan rincian sebagai berikut:

BPPK 5b-N	**SS: Manajemen pengetahuan yang berkualitas**							
	IKU: Indeks kualitas penelitian							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	90	90	Max / TLKV
Realisasi	76	86	86	149	149	238	238	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Isu Utama dan Implikasi
Indeks kualitas penelitian dihitung berdasarkan publikasi hasil penelitian ke berbagai jurnal nasional maupun internasional.
Akar Masalah
Keadaan WFH membuat koordinasi dan beberapa proses penelitian menjadi terhambat
Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Sudah diselesaikan 44 penelitian dengan indeks kualitas penelitian 238, dengan rincian: 26 penelitian pada jurnal internasional bereputasi tinggi, 2 penelitian pada jurnal internasional bereputasi sedang, 15 penelitian pada jurnal nasional terakreditasi Dikti, dan 1 penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional yang memiliki ISSN

Rekomendasi Rencana Aksi	PIC	Periode
Melakukan penelitian dan mempublikasikannya ke berbagai jurnal nasional maupun internasional	PKN STAN	2021

Indikator kinerja ini juga telah dilekatkan dengan manajemen risiko dimana telah diidentifikasi risiko pada lingkungan BPPK yaitu "PKN STAN tidak dapat menghasilkan penelitian yang berdampak bagi urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara" sebagai berikut:

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan
1. Penyesuaian beban kerja (IKU) dosen sehingga memiliki alokasi waktu yang leluasa untuk melakukan penelitian 2. Penyusunan pedoman (panduan) pelaksanaan penelitian dan pengmas 3. Sampai dengan akhir tahun 2020, telah ada 16 penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi tinggi 4. Pengembangan kompetensi penelitian terhadap civitas akdemika PKN STAN

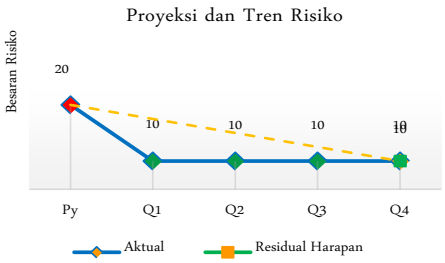

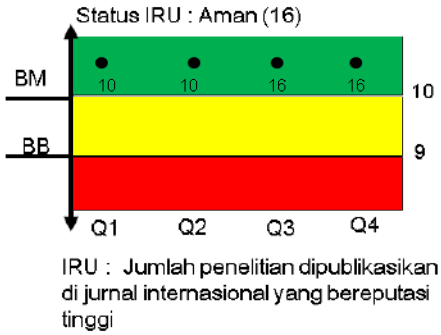

IRU : Jumlah penelitian dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi tinggi

6. Sertifikasi Kompetensi yang Sesuai Kebutuhan

Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan adalah proses pengakuan kompetensi di Bidang Keuangan Negara yang dilaksanakan dengan mengacu pada standar kompetensi, sesuai dengan kebutuhan unit pengguna.

6a-N Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi

IKU ini mengukur tingkat kepuasan peserta atas layanan program sertifikasi dan tingkat kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi. Program sertifikasi yang diukur pada IKU ini adalah Sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran, JF AKPD, dan PPJK. Kepuasan peserta sertifikasi diukur menggunakan survei

evaluasi dengan skala 4, yang dilakukan ketika ujian berlangsung/ melalui website sebagai bentuk konfirmasi mengambil sertifikat. Ditargetkan 80% peserta puas.. Peserta dinyatakan puas apabila menilai ≥ 3 pada minimal 50% aspek yang dinilai.

Aspek layanan yang dinilai meliputi:

1. Penyampaian informasi terkait penyelenggaraan ujian;
2. Kesesuaian prosedur pendaftaran dengan SOP/pengumuman prosedur;
3. Kelayakan tempat ujian;
4. Waktu pelaksanaan;
5. Profesionalitas petugas.

Aspek kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi meliputi:

1. Penyiapan sarana dan prasarana;
2. Penyiapan naskah soal;
3. Penyiapan administrasi ujian;
4. Ketersediaan tim penguji sebelum ujian;
5. Kesesuaian pelaksanaan ujian dengan jadwal;
6. Ketersediaan dokumentasi ujian.

IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sertifikasi diselenggarakan sesuai janji layanan dan ketentuan yang berlaku. Formula untuk mengukur capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula:

$$\left(\frac{\text{jumlah peserta yang puas}}{\text{jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi}} \times 40\%\right) + (\text{tingkat kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi} \times 60\%)$$

Capaian IKU ini dihitung secara tahunan dengan rincian sebagai berikut:

BPPK 6a-N	SS: Sertifikasi Kompetensi yang Sesuai Kebutuhan							
	IKU: Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	80%	80%	Max/ TLKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99,74	99,74	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Isu Utama dan Implikasi

1. IKU ini mengukur tingkat kepuasan peserta atas layanan program sertifikasi dan tingkat kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi.
2. Program sertifikasi yang diukur pada IKU ini adalah:

a. Sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran b. Sertifikasi PPJK c. Sertifikasi Jabatan Fungsional AKPD		
Akar Masalah		
Pandemi COVID-19 menyebabkan diperlukannya beberapa kali penyesuaian dalam penjadwalan penyelenggaraan sertifikasi		
Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
1. Telah dilakukan sertifikasi pada Pusdiklat AP, Pusdiklat BC dan Pusdiklat KNPK pada tahun 2020 2. Total Responden yang mengisi survey kepuasan penyelenggaraan sertifikasi berjumlah 98 Responden		
Rekomendasi Rencana Aksi	**Penanggung jawab**	**Periode**
Penyelenggaraan Sertifikasi tahun 2021 sesuai dengan prosedur dan janji layanan	Pusdiklat AP, Pusdiklat BC, Pusdiklat KNPK dan PKN STAN	Tahun 2021

7. Pengendalian Kualitas Pembelajaran yang Efektif

Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan mutu dan kualitas suatu produk atau layanan pembelajaran yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan janji layanan, serta dilakukan secara professional dan konsisten.

7a-N Indeks Pemenuhan Standar Mutu

Indeks pemenuhan standar mutu mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pembelajaran dengan berdasar pada standar mutu pembelajaran yang berlaku di BPPK. Dalam hal standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala BPPK nomor 97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan belum ditetapkan, maka pelaksanaan penjaminan mutu berpedomana pada peraturan atau keputusan terkait:

a. analisis kebutuhan pembelajaran;
b. desain pembelajaran;
c. validasi program;
d. penyelenggaraan pembelajaran;
e. evaluasi pembelajaran; dan
f. sarana dan prasarana pembelajaran.

Pelaksanaan penjaminan mutu dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan. Kriteria yang diuji dalam penjaminan mutu meliputi kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, kualitas isi, akurasi waktu, dan keamanan informasi. Ruang lingkup dan pembobotan penilaian penjaminan mutu pembelajaran pada Pusdiklat dan Balai Diklat mengikuti Standar Mutu Pembelajaran terbaru.

Formula:	
Indeks 5 =	90-100
Indeks 4 =	80-89,99
Indeks 3 =	70-70,99
Indeks 2 =	50-69,99
Indeks 1 =	0-49,99

IKU ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya pembelajaran di lingkungan BPPK yang terstandardisasi dengan kualitas yang terjaga dalam memenuhi kepuasan peserta pembelajaran dan mencapai target kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

BPPK 7a-N	**SS: Pengendalian Kualitas Pembelajaran yang Efektif**							
	IKU: Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	4	4	Max / TLKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Isu Utama dan Implikasi
Isu utama: Banyak pelatihan tatap muka yang dibatalkan/ditunda. **Implikasi:** Penilaian penjaminan mutu selain pelatihan tatap muka, perlu mempertimbangkan untuk menjamin mutu pelatihan e-learning dan PJJ.
Akar Masalah
COVID-19 menyebabkan ditunda, dibatalkan, atau di konversinya pelatihan tatap muka. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran dan mengurangi sampel yang bisa diambil untuk proses penilaian standar mutu pembelajaran.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
1. Pembahasan kurikulum pelatihan terkait Standar Mutu Pembelajaran 2. Perubahan *trajectory* IKU dari semesteran menjadi tahunan 3. PJJ Manajemen Penjaminan Mutu Pembelajaran untuk KPMU dan tim mutu unit 4. PJJ Penjaminan Mutu Pembelajaran untuk calon penilai penjaminan mutu 5. Proses penilaian kualitas pembelajaran		
Rekomendasi Rencana Aksi	**Penanggung jawab**	**Periode**
Pelaksanaan Proses Penilaian Standar Mutu Pembelajaran di lingkungan BPPK	Sekretariat Badan, Tim Penjaminan Mutu Pembelajaran	Semester I tahun 2021

8. Organisasi dan SDM yang Optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

8a-CP Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan adalah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan untuk kompetensi manajerial indeks keseuaian minimal 78%. SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan.

Job Person Match adalah Indeks kesesuaian antara kompetensi manajerial pejabat dengan SKJ untuk kompetensi manajerial. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyediakan data JPM eselon II dan III masing-masing unit eselon I. Data JPM eselon IV disediakan oleh Pengelola Kepegawaian masing-masing unit eselon I. Pada laporan capaian, diinformasikan juga capaian IKU pada setiap level jabatan Struktural (eselon II, III, IV). Untuk pejabat yg dikecualikan dalam formula adalah pejabat yang akan memasuki BUP. Tujuan IKU ini adalah agar tersedianya pejabat yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi sesuai jabatannya.

Formula untuk mengukur capaian Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan adalah sebagai berikut:

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat (Stuktural eselon II, III, IV) Kemenkeu yang telah memenuhi SKJ}}{\text{Jumlah Pejabat (Stuktural eselon II, III, IV) Kemenkeu yang telah mengikuti assessment}} \times 100\%$$

Terdapat addendum berupa perubahan *trajectory* untuk IKU ini dari semesteran menjadi tahunan. Capaian IKU Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan adalah sebagai berikut:

BPPK 8a-CP	SS: Organisasi dan SDM yang Optimal								
	IKU: Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan								
T/R	Q1	Q2 (pre addendum)	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	93,67%	-	-	-	-	93,67%	93,67%	Max / TLK V
Realisasi	93,63%	88,31%	88,31%	88,31%	85,62%	85,62%	98%	98%	
Capaian	-	94,28	-	-	-	-	104,62	104,62	

Isu Utama dan Implikasi

s.d.Triwulan IV 2020:

- Jumlah jabatan di BPPK= 175
- Jumlah pejabat aktif = 156
- Pejabat aktif BUP >2 tahun = 150
- Jumlah aktif BUP>2 tahun sudah AC= 150
- Jumlah JPM minimal 78%= 147
- Jumlah JPM kurang dari 78%= 3

Akar Masalah

Tingkat pemahaman mengenai urgensi perlunya dilakukan re-AC bagi para pegawai dan pemahaman mengenai kamus kompetensi baru dari PermenpanRB dapat berdampak pada hasil AC baru, dan adanya risiko penurunan JPM

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Dilakukan sosialisasi terhadap seluruh pegawai mengenai kamus kompetensi manajerial PermenpanRB No. 38 tahun 2017 terutama mengenai kompetensi baru terkait sosial kultural beserta pemahaman definisinya

2. Sosialisasi terhadap standar kompetensi jabatan pada setiap level mulai dari pelaksana s.d. Eselon I berdasarkan PermenpanRB No.38 tahun 2017
3. Penyampaian bahan sosialisasi dan peraturan terkait kepada calon aassesse yang telah mendapatkan jadwal re-AC
4. Re-AC dengan 9 kompetensi secara bertahap

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Melakukan monitoring terhadap realisasi rencana pengembangan kompetensi pegawai dan ketepatan penyampaian HAC dari penyelenggara Assessment baik dari Biro SDM maupun Pusdiklat PSDM 2. Menyediakan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi yang disediakan untuk mengembangkan kompetensi para pegawainya 3. Melakukan feedback bagi pegawai yang masih memiliki JPM <78%	Sekretariat Badan (Bagian Kepegawaian)	Tahun 2021

8b-CP Persentase Efisiensi Belanja Birokrasi

Pelaksanaan *office automation* diharapkan dapat mengurangi belanja birokrasi. Efisiensi belanja birokrasi ditunjukkan oleh penurunan persentase realisasi belanja pada suatu triwulan dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Persentase realisasi belanja diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan pagu belanja yang ditetapkan di awal tahun.

Lingkup belanja yang diukur oleh IKU ini meliputi: (i) belanja bahan percetakan dan konsumsi; (ii) belanja perjalanan dinas dalam negeri kecuali dalam rangka pelantikan, mutasi, dan diklat, dan (iii) RDK dan konsinyering. IKU ini diukur secara triwulan dan year-on-year (yoy) dimana data realisasi pada triwulan saat ini dan di tahun berjalan dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Apabila persentase realisasi pada tahun berjalan lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya, maka indeks capaian adalah 0.

Tujuan IKU ini adalah untuk menilai efektivitas *office automation* terhadap belanja birokrasi. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

Formula:
Persentase Efisiensi Belanja = (PersentaserRealisasi belanja birokrasi tahun Y-1)-(Persentase realisasi belanja birokrasi tahun Y)

Capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

BPPK 8b-CP	**SS: Organisasi dan SDM yang Optimal**							
	IKU: Persentase Efisiensi Belanja Birokrasi							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/ KP**
Target	-	-	-	-	-	10%	10%	Max / TLK V
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	73,87%	73,87%	
Capaian	-	-	-	-	-	120	120	

Isu Utama dan Implikasi
IKU ini ditentukan oleh nilai realisasi anggaran belanja birokrasi dan capaian Indikator Keluaran Program (IKP). Realisasi belanja birokrasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp26.095.063.845 dari pagu Rp59.476.932.592 (43,87%), sedangkan realisasi IKP adalah sebagai berikut: 1) Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan: 6,8153% dari target 3,25%; 2) Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital: 82,52% dari target 50%; 3) Persentase Kualitas Implementasi Sertifikasi: 99,74% dari target 70%; 4) Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan: 4,41 dari target 4,39; dan 5) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran: 97,90% dari target 95%
Akar Masalah
Penyebab realisasi anggaran belanja birokrasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 yang rendah adalah adanya perubahan metode pelaksanaan kegiatan *offline* menjadi *online,* maupun penundaan/pembatalan beberapa kegiatan pembelajaran dan sertifikasi sebagai dampak Pandemi COVID-19
Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Melakukan monitoring/koordinasi dengan pengelola keuangan dan penanggungjawab kegiatan di Lingkungan BPPK

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Melakukan monitoring guna memastikan keberlanjutan pelaksanaan Instruksi Menteri Keuangan Nomor IMK-346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan dan IMK-595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, dan Honorarium Jasa Profesi di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun anggaran 2021	Sekretariat Badan, Pusdiklat, PKN STAN, dan Balai Diklat terkait.	Triwulan I s.d. IV 2021

8c-CP Persentase Penyelesaian Program Transformasi Digital

Transformasi Digital merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital.

Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut dalam *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) pada Desember 2019 telah ditetapkan 15 (limabelas) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) yaitu:

Digital Transformation Initiatives	*Unit in Charge*
1. *The New Thinking of Working*	Setjen
2. Satu Data SLDK	Setjen
3. Layanan Digital Kemenkeu	Setjen
4. e-Kemenkeu	Setjen
5. Organisasi dan SDM	Setjen
6. *Modern e-learning*	BPPK, Setjen
7. *Unified revenue account management*	DJP, DJBC, DJA
8. *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan	DJP, DJBC, DJA, LNSW
9. *Core Tax System*	DJP
10. Pengelolaan Aset Negara	DJKN
11. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran	DJPB
12. Penyediaan Data Transaksi Pemda	DJPK
13. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah	DJPB

Digital Transformation Initiatives	Unit in Charge
Pusat dan Pemda	
14. Integrasi Probis Perencanaan dan Penganggaran	DJA, DJPB, DJPK, BKF
15. Pengelolaan Dana Pensiun	DJA

Tujuan IKU ini untuk memonitor implementasi inisiatif strategis *transformasi digital* Kementerian Keuangan. Formula untuk mengukur capaiannya adalah sebagai berikut:

Formula:

$$\frac{Dur\ 1}{Total\ Dur} \times Capaian\ M\ 1 + \frac{Dur\ 2}{Total\ Dur} \times Capaian\ M\ 2 + \ldots \frac{Dur\ n}{Total\ Dur} \times Capaian\ Mi\ n$$

Dur i: Durasi Pelaksanaan Milestone ke i *Capaian Mi: Capaian Milestone ke i*

Capaian IKU ini tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BPPK 8c-CP	SS: Organisasi dan SDM yang Optimal							
	IKU: Persentase Penyelesaian Program Transformasi Digital							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	8,20%	21,19%	21,19%	29,80%	29,80%	85%	85%	Max / T LKV
Realisasi	9,51%	26,46%	26,46%	46,75%	46,75%	93,42%	93,42%	
Capaian	115,98	120	120	120	120	109,91	109,91	

Isu Utama dan Implikasi

BPPK dan Setjen bertanggungjawab pada *digital transformation initatives* nomor 6 yaitu *Modern e-learning* sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan SDM.
Pengukuran realisasi IKU dilakukan oleh CTO.

Tindakan yang Telah Dilakukan		
1. IS 1: Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi dan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi 2. IS 6: Telah disusun arsitektur to be BDAT KM s.d. level 2 pada orbus 3. IS 6: Implementasi full *e-learning* sebanyak 70 program dan 51.960 peserta pada Q1 2020 4. IS 6: Telah dilakukan pembahasan dengan Biro SDM terkait interkoneksi antara KLC dan HRIS 5. IS 8: Akan diselenggarakan dua pelatihan terkait *joint program* 6. IS 12: Koordinasi awal antara Pusdiklat KNPK dengan DJPK terkait kesiapan BPPK melakukan penyusunan objektif dan kurikulum/materi *executive training* dan pelatihan pendampingan 7. IS 12: Pusdiklat AP telah melaksanakan pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah dan Desa dalam rangka peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan APBN dan APBD		
Rekomendasi Rencana Aksi	**Penanggung jawab**	**Periode**
Memonitor target penyelesaian pada WBS (*milestone*)	Sekretariat Badan (Bagian OTL)	2021

8d-CP Indeks Integritas Organisasi

IKU ini mengukur Capaian Zona Integritas-Wilayah Bebas Korupsi dan Capaian Indeks Persepsi Integritas:

1. Pemenuhan kriteria ZI-WBK berdasarkan penilaian KemenPAN-RB;

   Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis intergritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

   Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019.

   Menindaklanjuti PermenPAN-RB 52/2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

   Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan

penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 15.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai komponen pengungkit minimal 85, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,88 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,88 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 17.

Kementerian Keuangan menargetkan satuan kerja yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan predikat ZI menuju WBK/WBBM tahun 2020 sebanyak 150 unit kerja, dengan rincian sebagai berikut:

Unit Es I	Target 2020
Setjen	1
DJA	1
DJP	40
DJBC	37
DJPb	45
DJKN	23
DJPK	1
DJPPR	1
BPPK	1
Kemenkeu	**150**

2. Survei persepsi publik dan internal atas integritas Kementerian Keuangan berdasarkan penilaian ITJEN

   Indeks persepsi integritas adalah hasil dari penilaian mandiri persepsi integritas yang telah ditetapkan dalam Perdirjen nomor 142/IJ/2018, yang dikembangkan dari *Integrity Assessment* yang telah dilaksanakan oleh KPK.

   Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan (Inspektorat Jenderal dhi. Setitjen dan IBI dan berkoordinasi dengan setiap UKI UE I serta disupervisi oleh KPK)

Pengukuran dilakukan atas hasil survei yang dilakukan kepada seluruh pejabat/pegawai dan sampling pengguna layanan pada seluruh unit sampel yang telah ditentukan, survei dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi selama tahun berjalan.

Metodologi yang dilakukan untuk penilaian indeks persepsi integritas, baik internal dan eskternal, melalui:

a. Survei

b. FGD

c. Penilaian Lapangan (interview, observasi, dan reviu dokumen)

Penilaian dilakukan melalui kuesioner survei online melalui aplikasi . Atas hasil survei yang diterima, dilakukan FGD untuk mengkonfirmasi hasil survei, dan penilaian lapangan berupa wawancara pengguna layanan secara langsung dan pengumpulan dokumen terkait integritas dan kualitas layanan pada unit sampel yang didatangi.

Dari hasil FGD dan penilaian lapangan, dan didukung dokumen informasi terkait pelanggaran integritas dari IBI, dilakukan kalibrasi nilai hasil survei yang dilakukan oleh tim penilai dari Itjen, hasil kalibrasi ini yang menjadi nilai (indeks) persepsi integritas. Penilaian persepsi integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember

Formulasi perhitungan IKU ini adalah:

Formula:
= $\frac{\text{Capaian IPI + Capaian ZI-WBK}}{2}$

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Capaian IKU ini untuk tahun 2020:

BPPK 8d-CP	**SS: Organisasi dan SDM yang Optimal**							
	IKU: Indeks Integritas Organisasi							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	95,05	95,05	Max / T LKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	108,68	108,68	
Capaian	-	-	-	-	-	114,34	114,34	

Isu Utama dan Implikasi
IKU ini menghitung nilai dari IPI dan ZI-WBK. Nilai IPI dihitung melalui hasil pembobotan nilai hasil survei internal dan/atau eksternal yang dapat disesuaikan dengan hasil pelaksanaan FGD dan Penilaian Lapangan. **Nilai IPI BPPK: 87,72** Unit yang diusulkan mengikuti penilaian WBK/WBBM tahun 2020: 1. BDK Yogyakarta 2. BDK Manado 3. BDPim Magelang 4. **Nilai ZI WBK BPPK: 139,27** Ketiga unit lolos yang diusulkan ZI WBK tahun 2020 lolos nasional
Akar Masalah
1. FGD tidak dapat dihadiri oleh PIC, hanya dihadiri oleh pegawai yang dipilih oleh Itjen 2. Format kuesioner yang baru, berbeda dari tahun sebelumnya 3. Adanya kebijakan-kebijakan baru yang muncul di saat Pandemi 4. Belum mendapatkan laporan hasil akhir dari Itjen
Tindakan yang Telah Dilaksanakan
1. Koordinasi secara aktif dengan Inspektorat Jenderal terkait pelaksanaan Integritas Organisasi. 2. Pelaksanaan Survey IPI pada bulan Oktober.

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait pemilihan unit sampel dan metode penilaian 2. Menyampaikan kepada Unit sampel terkait pelaksanaan PPI 3. Monitoring Pelaksanaan PPI 4. Mengikuti FGD dengan unit terkait dan Inspektorat Jenderal **5.** Menyampaikan Hasil PPI	Sekretariat Badan (Bagian Kepegawaian	Sepanjang tahun 2021

8e-CP Tingkat Implementasi *Learning Organization*

Tingkat Implementasi *learning organization* merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai *learning organization*. *Learning organization* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Tingkat implementasi *learning organization* menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep *Enterprise Learning System Assessment*, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kemenkeu *Corporate University*. Tingkat *learning organization* dapat ditinjau dari input, proses, dan output pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari:

1 *Strategic fit and management commitment*
2. *Learning function organization*
3. *Learning spaces*
4. *Learning solutions*
5. *Leaders participation in learning process*
6. *Learners*
7. *Learning culture*
8. *Feedback*
9. *Learning value chain*
10. *Learners performance*

Pengukuran IKU dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut:

a. Penilaian (Bobot: 40%)
   Penilaian dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat.
b. *Self Assesment* (Bobot: 30%)
   Self assesment dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK.
c. Survei (Bobot: 30%)
   Dalam pelaksanaan survei:
   (1) Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah Komite Penilai LO (BPPK);
   (2) Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I merupakan usulan dari masing-masing unit eselon I; dan

(3) Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi sampel.

Formulasi perhitungan IKU ini adalah:

Formula:
Tingkat implementasi *learning organisation* = 40% Hasil Penilaian + 30% Hasil *Self Assesment* + 30% Persepsi Survei

Pada tahun 2020, realisasi IKU ini adalah sebagai berikut:

BPPK 8e-CP	**SS: Organisasi dan SDM yang Optimal**							
	IKU: Tingkat Implementasi *Learning Organization*							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/ KP**
Target	-	-	-	-	-	75	75	Max / TLKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,59	95,59	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Isu Utama dan Implikasi
Tingkat Implementasi *learning organization* merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai *learning organisation*. *Learning organization* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.
Akar Masalah
Kegiatan WFH dan Dampak COVID-19 menyebabkan beberapa kegiatan terkait pembelajaran dikonversi/dibatalkan/ditunda.
Tindakan yang Telah Dilaksanakan
1. Telah disusun komponen penilaian IKU LO, yang telah mendapat masukan dari UEI dan diuji coba 2. Telah dilakukan Sosialisasi IKU LO ke seluruh unit Eselon I dalam Learning Engagement Forum I dan II 3. Telah disusun Buku Panduan *Learning Organization*

4. Telah dilakukan *kick-off* pengisian survey pada LCM 28 September 5. Survey sedang berlangsung s.d. 16 Oktober dengan responden pegawai di unit sampel sesuai longlist yang sudah disampaikan UE1

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Pembentukan Komite Penilai LO tahun 2021 2. Pedoman *Learning organization 2021* 3. Pengukuran Tingkat Implementasi *Learning Organization 2021* 4. Pelaporan	Komite Penilai LO	1. Januari 2021 2. Februari-Maret 2021 3. Oktober-Desember 2021 4. Desember 2021

Indikator kinerja ini juga telah dilekatkan dengan manajemen risiko dimana telah diidentifikasi risiko pada lingkungan BPPK yaitu "Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan variasi model terintegrasi di tempat kerja (*experiental learning*), kolaboratif (*social learning*) dan terstruktur (*structured learning*) tidak dapat terlaksana secara optimal" sebagai berikut:

Proyeksi Risiko
BPPK telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit Corpu untuk target waktu penyelesaian tahun 2020, namun hasil verifikasi tim Itjen, masih terdapat 1 rekomendasi yang masih memerlukan tindak lanjut yang lebih komprehensif. Risiko ini akan di refine dalam hal nama risiko, penyebab, dan dampak, termasuk juga mengenai data-data dalam penentuan Level Kemungkinan, Level Dampak, dan Indikator Risiko Utama sampai dengan rencana mitigasinya, mengingat risiko ini adalah salah satu risiko yang masuk pada profil risiko Kemenkeu-*wide*.

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan
1. Rapat pembahasan temuan Inspektorat Jenderal terkait kesiapan infrastruktur dan pengelolaan pengetahuan (kesiapan sarana dan prasarana) 2. Rapat pembahasan pemanfaatan jabatan fungsional PTP di lingkungan BPPK dengan Biro Organta, Biro SDM, dan Biro Cankeu. 3. Sudah ada output KAP hasil pelatihan 10:20:70 di Telkom Corpu, dan saat ini sedang berjalan pelatihan model pembelajaran 10:20:70 di PusdKU 4. Kuesioner telah lulus uji validitas dan realibilitas, serta uji coba kertas kerja self assessment pada Pusdik AP, Pusdik KNPK, dan BDK Malang 5. Penyampaian hasil refinement IKU LO ke Biro Perencanaan dan Keuangan 6. Pada tanggal 20 Mei 2020 telah dilaksanakan *Learning Engagement Forum* yang didalamnya membahas IKU LO kepada Unit Eselon I, Telah internalisasi

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan
pemahaman terkait pentingnya komitmen peserta/alumni dan atasan peserta/alumni/kepala satker dalam evaluasi pascapembelajaran dalam forum tsb. 7. Pelaksanaan e-learning Open Access selama masa *work from home* 8. Telah disampaikan telaah PER-2/PP/2019 terkait penggunaan Jafung PTP melalui ND-162/PP.111/2020 9. Telah tersedia *landing page* yang terhubung dengan KLC dan penyempurnaan lainnya sebagai bentuk branding dan sosialisasi secara terstruktur. 10. Telah dikembangkan fitur evaluasi untuk e-learning di KLC dan penggabungan fitur evaluasi e-learning (blended) dari KLC ke Semantik. 11. Telah dilaksanakan integrasi evaluasi pembelajaran pada KLC. 12. Telah terselesaikannya 596 ISD s.d. akhir tahun 2020 13. Penambahan jumlah konversi pelatihan tatap muka menjadi e-learning/PJJ di luar program reguler 14. Pelaksanaan FGD untuk mensosialisasikan LO terutama terkait probis yang terpengaruh adanya wabah corona 15. Pelaksanaan harmonisasi AKP 2021 16. Integrasi pembelajaran 10:20:70 di Semantik 17. Pengadaan alat pendukung multimedia dan editing software berlisensi original

Rekomendasi
Akan tetap diidentifikasi pada profil risiko 2021, di *refine* mengenai nama risiko, penyebab, dan dampak, termasuk juga mengenai data-data dalam penentuan Level Kemungkinan, Level Dampak, dan Indikator Risiko Utama (IRU) sampai dengan rencana mitigasinya.

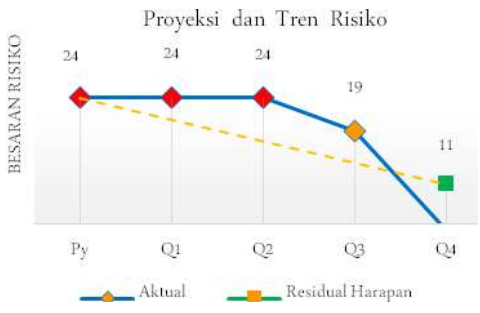

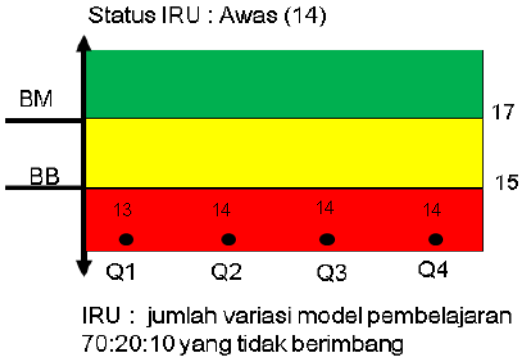

9. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus

dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

9a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

IKU ini mengukur tindak lanjut Pemerintah terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP dan LKBUN yang perlu diselesaikan sesuai dengan rekomendasi BPK. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama DJPb, Itjen, unit eselon I terkait dan Auditor BPK.
2. rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam LHP.

IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Formulasi IKU ini adalah:

Formula:

:

$$\text{Semester I} = \left(\frac{\text{Rekomendasi LKPP dinyatakan selesai oleh BPK}}{\textit{Outstanding}\ \text{rekomendasi LKPP s.d. 2019}} \times 50\%\right) + \left(\frac{\text{Rekomendasi LKBUN yang dinyatakan selesai oleh BPK}}{\textit{Outstanding}\ \text{rekomendasi LKBUN s.d. 2019}} \times 50\%\right)$$

$$\text{Semester II} = \left(\frac{\text{Rekomendasi LKPP dinyatakan selesai oleh BPK + yang diusulkan selesai}}{\textit{Outstanding}\ \text{rekomendasi LKPP s.d. 2020}} \times 50\%\right) + \left(\frac{\text{Rekomendasi LKBUN yang dinyatakan selesai oleh BPK + yang diusulkan selesai}}{\textit{Outstanding}\ \text{rekomendasi LKBUN s.d. 2020}} \times 50\%\right)$$

Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

BPPK 9a-CP	SS: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal IKU: Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	30%	30%	-	30%	89%	89%	Max/ TLKV
Realisasi	N/A	56,53%	56,53%	56,53%	56,53%	92,52%	92,52%	
Capaian	N/A	120	120	120	120	103,96	103,96	

Isu Utama dan Implikasi
LKPP dan LKBUN tahun 2019 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini WTP. Rekomendasi yang disampaikan oleh BPK ditindaklanjuti oleh masing-masing unit sesuai dengan kewenangannya. Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti tersebut diukur secara semesteran dengan target akumulatif pada Semester I adalah 30% dan Semester II adalah 89%.
Akar Masalah
Tidak terdapat Rekomendasi *outstanding* di LKPP dan LKBUN dengan UIC BPPK.
Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UIC monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN, telah menindaklanjuti langkah-langkah pengelolaan kinerja terhadap update data penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti.

Rekomendasi Rencana Aksi	**Penanggung jawab**	**Periode**
Berkoordinasi dengan Setjen (Biro Perencanaan dan Keuangan) dan DJPb	Sekretariat Badan (Bagian Keuangan)	Tahun 2021

9b-CP Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

Tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 15 perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. Pembahasan status penyelesaian tindak lanjut dilakukan dalam forum pembahasan bersama BPK, Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Unit Eselon I terkait.

Rekomendasi BPK yang dihitung tindak lanjutnya adalah rekomendasi *outstanding* sampai dengan tahun 2019 yang statusnya masih "dalam proses" dan Rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2020 atas LK BA 15 tahun 2019.

Untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong peningkatan/perbaikan Laporan Keuangan BA 15 Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan serta tingkat penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti telah sesuai rekomendasi BPK dan ketentuan yang berlaku.

Formulasi IKU ini adalah:

Formula:	
Formula = A/B x 100%	
Keterangan: A: Jumlah Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan BA 015 s.d. LK TA 2019 (atas tindak lanjut yang "masih dalam proses") B: Jumlah *outstanding* TL rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan BA 015 s.d. LK Tahun 2018 (s.d. tahun 2019) dan jumlah rekomendasi BPK atas LK BA 015 TA 2019 (diterima tahun 2020) Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut: **Untuk A:** Jumlah konsep temuan LK BA 15 yang selesai ditindaklanjuti dibedakan menjadi:	
Nilai 0	apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh unit eselon I terkait;
Nilai 0,5	apabila rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti oleh unit eselon I terkait namun belum dapat diselesaikan;
Nilai 0,7	apabila tindak lanjut sudah diselesaikan oleh Unit Eselon I terkait namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I terkait lainya di lingkungan Kemenkeu, sehingga belum dapat dikirim ke BPK;
Nilai 0,9	apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh pihak eksternal Kemenkeu terkait karena adanya kendala di luar kendali pihak eksternal Kemenkeu tersebut, sehingga belum dapat dikirim ke BPK;
Nilai 1	apabila tindaklanjut telah selesai di Internal dan/atau Eksternal Kemenkeu serta telah dikirim ke BPK dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" dari BPK

Capaian IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BPPK 9b-CP	SS: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	IKU: Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/ KP**
Target	-	70	70	-	70	85	85	Max / T LKV
Realisasi	N/A	70	70	-	70	94,43	94,43	
Capaian	N/A	100	100	-	100	111,09	111,09	

Isu Utama dan Implikasi

Pada Semester II 2020, capaian IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 diperoleh dari 2 unsur, yaitu unsur nilai opini BPK dan unsur penyelesaian rekomendasi temuan pemeriksaan BPK. Terdapat rekomendasi temuan pemeriksaan BPK yang belum selesai dengan 3 poin utama sebagai berikut:

1. Belum adanya progress realisasi penyetoran piutang yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL (Pusdiklat KNPK, BDK Pekanbaru, dan BDK Manado).
2. Dalam proses pelimpahan piutang ke KPKNL (PKN STAN).
3. Kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa (Pusdiklat Pajak).

Untuk unsur opini BPK atas LK BA 15 adalah wajar tanpa pengecualian, sehingga mendapatkan nilai 70. Sedangkan unsur penyelesaian rekomendasi temuan BPK mendapatkan nilai 24.43

Akar Masalah

1. Kesulitan melakukan penagihan kepada pihak penyedia karena pihak penyedia yang sulit/tidak dapat dihubungi.
2. Kurangnya koordinasi antara satker dengan KPKNL mitra terkait proses penagihan piutang yang sudah dilimpahkan ke PUPN.
3. Belum tercapainya kesepakatan antara *auditor* dengan *auditee* terkait besaran kelebihan bayar yang harus dikembalikan ke kas negara.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Meminta satker terkait untuk melakukan koordinasi dengan KPKNL terkait proses penagihan piutang.
2. Mendorong/memfasilitasi koordinasi antara auditor dengan *auditee* untuk membahas penyelesaian/tindak lanjut temuan.
3. Melakukan pelimpahan piutang atas piutang macet ke DJKN c.q. PUPN secara berjenjang melalui Sekretariat Jenderal

4. Meminta Itjen untuk melakukan reviu atas dokumen tindak lanjut satker sesuai kesepakatan dengan BPK.		
Rekomendasi Rencana Aksi	**Penanggung jawab**	**Periode**
1. Melakukan koordinasi dengan satker terkait progress penagihan piutang yang telah diserahkan ke PUPN. 2. Melakukan koordinasi dengan Rocankeu terkait reviu Itjen atas tindak lanjut temuan BPK.	Bagian Keuangan	Januari s.d. Maret 2021

9c-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU reformulasi yang bertujuan mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran K/L dalam aspek kualitas dan aspek administrative. Capaian dihitung dari dua komponen, yaitu:

1. Nilai kinerja anggaran (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)). Nilai capaian diperoleh berdasarkan:
   a. Nilai aspek implementasi (penyerapan anggaran, capaian output, efisiensi, dan konsistensi); dan
   b. Nilai aspek manfaat (pencapaian Sasaran Strategis level K/L dan Sasaran Program level eselon I K/L).
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

   Nilai capaian diperoleh dari 12 indikator, yaitu: Frekuensi Revisi DIPA, Deviasi Hal. III DIPA, Retur SP2D, Realisasi Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Penerbitan SPM secara benar, Deviasi Renkas, Pagu Minus Belanja Pegawai, Dispensasi SPM, Ketepatan Waktu Data Kontrak, Pertanggungjawaban UP, dan Penyampaian LPJ.

Tujuan IKU ini adalah untuk Untuk mengetahui kinerja satker K/L dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal. Formulasi IKU ini adalah:

Formula:

$$\text{KPA} = (40\% \times \textit{Nilai SMART}) + (60\% \times \textit{Nilai IKPA})$$

Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BPPK 9c-N	SS: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	IKU: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q 3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Max / TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	97.47%	97.47%	98,24%	98,24%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	102,6	102,6	103,41	103,41	

No.	Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Bobot	Nilai	Realisasi (Nilai Tertimbang)
Nilai IKPA				**97,90**
1	Pengelolaan UP	8	100.00	8.00
2	Data Kontrak	15	100.00	15.00
3	Kesalahan SPM	5	90.00	4.50
4	Retur SP2D	5	99.87	4.99
5	Hal III DIPA	0	96.86	0.00
6	Revisi DIPA	0	100.00	0.00
7	Penyelesaian Tagihan	12	100.00	12.00
8	Konfirmasi Capaian Output	10	99.85	10.00
9	Rekon LPJ	5	100.00	5.00
10	Renkas	5	100.00	5.00
11	Realisasi	15	90.78	13.62
12	Pagu Minus	5	100.00	5.00
13	Dispensasi SPM	5	100.00	5.00
Nilai SMART				**98.47**
Nilai Capaian IKU				**98,24**

Isu Utama dan Implikasi

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) ditentukan oleh nilai IKPA (bobot 40%) dan SMART (bobot 60%). Sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-562/PB/2020 dan S-614/PB/2020, sejak triwulan III 2020 telah dilakukan penilaian kembali IKPA, kecuali indikator revisi DIPA dan deviasi hal III DIPA yang tetap direlaksasi. Dalam pelaksanaannya, dihadapi beberapa kendala terkait pencapaian nilai unsur IKPA, yaitu retur SP2D, kesalahan SPM, dan realisasi anggaran, serta unsur SMART yaitu penyerapan anggaran.

Akar Masalah		
1. Terdapat retur SP2D karena nomor rekening penerima pembayaran yang tidak aktif/berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan adanya kesalahan data yang diberikan pihak rekanan. 2. Terdapat kesalahan SPM yang disebabkan karena kegagalan validasi data rekening supplier, kesalahan data supplier, serta terdapat perubahan data supplier oleh satker lain yang menyebabkan perubahan data supplier yang sudah terdaftar pada SPAN KPPN. 3. Terdapat beberapa kegiatan yg dibatalkan atau dialihkan pelaksanaannya secara online, utamanya kegiatan pelatihan, sehingga tidak ada realisasi beberapa jenis belanja seperti belanja perjalanan dinas, perubahan metode bekerja dari *Work from Office* menjadi *Work from Home* menyebabkan terjadi penurunan beberapa jenis belanja seperti belanja operasional dan belanja bahan/konsumsi, serta adanya pengadaan barang dan jasa yg terkendala di masa pandemi mengakibatkan kurangnya nilai realisasi anggaran		
Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
1. Melaksanakan *video conference coaching clinic* dan forum *Community of Practice* KLC Kinerja Anggaran (Kijang) BPPK guna monitoring dan koordinasi satker dalam pengelolaan keuangan. 2. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil forum *coaching clinic* melalui *Community of Practice (COP)* pada KLC maupun WhatsApp Group Kinerja Anggaran (Kijang BPPK).		
Rekomendasi Rencana Aksi	**Penanggung Jawab**	**Periode**
Mengoptimalkan pemanfaatan Community of Practice Kijang BPPK guna mengomunikasikan strategi pencapaian IKU PKPA TA 2021 di lingkungan BPPK dan memonitor upaya satker dalam pencapaian IKU tersebut.	Pengelola Keuangan di Lingkungan BPPK	Januari s.d. Maret 2021

Indikator kinerja ini juga telah dilekatkan dengan manajemen risiko dimana telah diidentifikasi risiko pada lingkungan BPPK yaitu “Ketidaktercapaian Target Keluaran Belanja Negara” sebagai berikut:

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan
1. Melakukan monitoring capaian-capaian nilai IKPA sesuai dengan arahan dari Setjen, meskipun terdapat relaksasi atas capaian nilai IKPA/PKPA sesuai dengan S-258/PB/2020 2. *Coaching clinic* Pengelolaan keuangan Negara BPPK telah dilaksanakan setiap triwulan 3. Revisi anggaran terkait penanganan covid-19 4. Penyampaian informasi ke Satker di lingkungan BPPK untuk mempersiapkan revisi (pemotongan) untuk *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan covid-19 5. Pengadaan (belanja modal) peralatan WFH dan PJJ 6. Melakukan review rencana kegiatan, rencana umum pengadaan, dan rencana penarikan dana Triwulan IV TA 2020

Rekomendasi
Akan tetap diidentifikasi pada profil risiko 2021, di *refine* mengenai penyebab, data-data dalam penentuan Level Kemungkinan, Level Dampak, dan Indikator Risiko Utama (IRU), sampai dengan rencana mitigasinya.

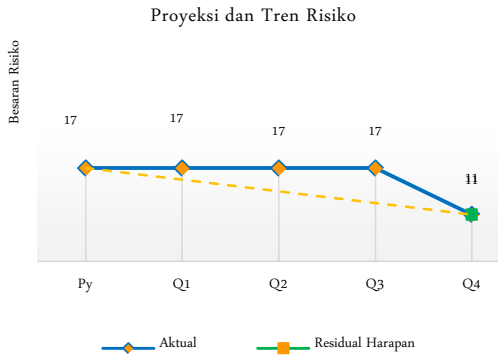

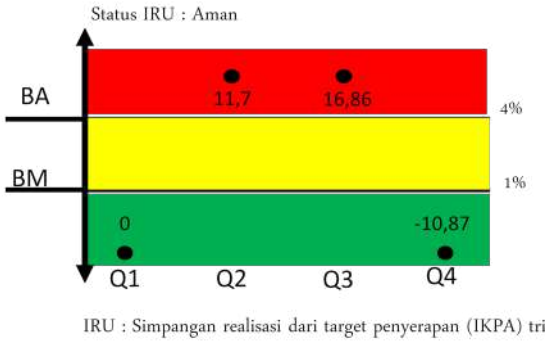

IRU : Simpangan realisasi dari target penyerapan (IKPA) tri

11. Sistem Manajemen Informasi yang Andal

Sistem manajemen informasi yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau *Business Impact Analysis* (BIA).

10a-CP Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK adalah kegiatan penyelesaian proyek TIK strategis (baik yang ada dalam IS RBTK maupun non IS RBTK) tahun 2020 yang telah diselesaikan sesuai norma waktu.

Proyek TIK strategis adalah Proyek TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon I yang terkait dengan rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau Unit Eselon I/Non Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Unit Eselon I/Non Eselon I yang bersangkutan.

Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) tahun 2020 terdiri dari 15 inisiatif strategis yang terdiri dari 1 IS yang dilanjutkan dari 2019, penajaman 11 IS 2019, dan tambahan 3 IS digital baru.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur kualitas pengelolaan sistem TIK melalui ketersediaan sistem layanan TIK dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan TIK dengan tingkat *downtime* yang seminimal mungkin, dan penyelesaian proyek strategis TIK yang terdapat dalam IS RBTK maupun yang tidak terdapat dalam IS RBTK. Formulasi IKU ini adalah:

Formula:
Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK = Rata-rata Penyelesaian *Milestones* Capaian Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK = Realisasi Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK / 82%

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BPPK 10a-CP	**SS: Sistem Manajemen Informasi yang Andal**							
	IKU: Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	-	85%	Max / TLKV
Realisasi	19%	55,33%	55,33%	56,19%	56,19%	100%	100%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	

Isu Utama dan Implikasi
1. Membutuhkan waktu untuk riset otentikasi menggunakan Keycloack pada masa finalisasi pengembangan KMS, sehingga pengajuan hosting KMS terlambat dan baru dilakukan di pertengahan Desember 2020. Adapun hosting baru lulus di bukan Januari 2021 (implementasi KMS tidak tercapai secara sempurna) 2. Keterlambatan finalisasi KLC Mobile, sehingga baru selesai di awal Desember 2020

Akar Masalah		
1. Keycloack belum pernah digunakan, namun berpotensi mendukung otentikasi KMS yang terintegrasi dengan KLC2 2. Bug tak terduga yang relatif banyak ditemukan di KLC Mobile menjelang implementasi selama bulan November 2020		
Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
1. Penyelesaian seluruh dokumentasi dan pengembangan sistem informasi - KLC 2.1 2. Penyelesaian dokumen analisis spesifikasi dan kebutuhan + rancangan + pengembangan + pengujian sistem informasi - KMS (implementasi tidak tercapai secara sempurna) 3. Penyelesaian seluruh dokumentasi dan pengembangan sistem informasi - KLC Mobile 4. Penyelesaian seluruh dokumentasi sistem informasi - Machine Learning (analisis, rancangan, dan pengembangan) 5. Sosialisasi sistem informasi: KMS, KLC Mobile, dll		
Rekomendasi Rencana Aksi	**Penanggung jawab**	**Periode**
Memperbarui proyek strategis TIK 2020 menjadi 2021	Bagian TIK, Sekretariat Badan	Tahun 2021

Progress Inisiatif Strategis

Selain 20 Indikator Kinerja Utama yang diukur, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan memiliki Inisiatif Strategis Program Unggulan “Digital Learning Manajemen Keuangan Negara”. Program Unggulan ini diperuntukan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara agar dapat memahami pengelolaan keuangan negara secara komprehensif.

Pelatihan ini terdiri dari tiga buah e-learning yang dapat diikuti secara sekuensial yaitu :

a. E-learning Manajemen Keuangan Negara

b. E-learning Dasar-dasar Penyusunan APBN

c. E-learning Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan SKPP

Progress Inisiatif Strategis Program Unggulan “Digital Learning Manajemen Keuangan Negara” adalah sebagai berikut:

SS/IKU	Proses Pembelajaran yang Kreatif/Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital
IS	*Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara
Periode IS	Januari s.d. Desember 2020
Output	1. 10.500 peserta pelatihan 2. Program *Basic E-Learning* Manajemen Keuangan Negara

Progres	**Status: Selesai**	

Penjelasan:

1. Tingginya capaian *output* dibandingkan dengan target sebesar 176,88% merupakan indikator yang menunjukkan tingginya antusiasme jajaran pimpinan Kementerian Lembaga (K/L) dalam mendukung keberhasilan program *Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara Tingkat Dasar yang diinisiasi Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (AP), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
2. Salah satu kunci keberhasilan Pusdiklat AP dalam meraih kepercayaan dari jajaran pimpinan K/L untuk mendukung keberhasilan program unggulan ini adalah melalui upaya *marketing* sektor pubilk yang efektif, yang antara lain dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan kerja yang sudah terbangun selama ini.
3. Sedangkan besarnya capaian efisiensi anggaran pada Program Proyek Unggulan ini karena kami mengoptimalkan sumber daya yang ada di Pusdiklat AP dengan membuat *training* material sendiri, melakukan promosi melalui media sosial dan *webinar* Pusdiklat AP.

Output:

1. 26.841 peserta
2. Program *basic e-learning* Manajemen Keuangan Negara

Anggaran	
Pagu	**Realisasi**
Rp122.046.000	Rp1.390.000

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran BPPK Tahun Anggaran 2020

Secara umum, realisasi anggaran BPPK tahun 2020 digunakan untuk belanja kegiatan-kegiatan berikut ini:

a. Penyelenggaraan layanan pembelajaran baik di Pusdiklat maupun di Balai Diklat.

b. Penyelenggaraan layanan pendidikan program diploma pada PKN STAN.
c. Penyelenggaraan beasiswa Pascasarjana pada Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
d. Pembuatan *knowledge capture* pada setiap satuan kerja.
e. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di Pusdiklat Bea Cukai, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, serta Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.
f. Penyusunan Kurikulum, Penyusunan Modul, Desain Program, dan Evaluasi Pascapembelajaran di Pusdiklat-pusdiklat.
g. Penyelenggaraan Kajian Akademis pada Pusdiklat.
h. Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan BLU pada PKN STAN.
i. Penyediaan layanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelatihan dan perkantoran di setiap satuan kerja berupa pengadaan /belanja modal.
j. Penyelenggaraan dukungan manajemen satuan kerja di setiap satuan kerja pada Pusdiklat, PKN STAN, dan Balai Diklat; dan
k. Penyelenggaraan dukungan manajemen eselon I di Sekretariat Badan.

2. Permasalahan /Kendala yang Dihadapi

a. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan dari rencana awal dan perubahan metode pelaksanaan yang semula direncanakan tatap muka langsung (klasikal) menjadi *e-learning* atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Perubahan metode ini berpengaruh pada realisasi anggaran.
b. Selain kegiatan pelatihan, beberapa kegiatan lain juga mengalami penundaan, perubahan metode pelaksanaan, atau bahkan pembatalan sebagai dampak Pandemi Covid-19, yaitu kegiatan *open class*, seminar, workshop, forum internasional *CorpU Summit* dan *ATD International Conference*, *call for paper*, kerjasama pelatihan dengan pemerintah daerah, serta beberapa kegiatan lainnya.
c. Pandemi Covid-19 juga turut mempengaruhi kegiatan pengadaan barang/jasa atau realisasi belanja modal, antara lain mundurnya jadwal pengadaan dan gagal lelang dari yang direncanakan.

3. Penjelasan atas Realisasi Anggaran yang Tidak Mencapai Target

Realisasi anggaran BPPK tahun 2020 dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pergeseran/mundurnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya
b. Perubahan metode pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang semula direncanakan tatap muka (klasikal) menjadi *e-learning*, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), atau webinar

c. Pergeseran/mundurnya jadwal pengadaan belanja modal dan adanya gagal lelang pengadaan, sehingga penyerapan tidak sesuai rencana

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK
Tahun 2020

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
015.11.04	**Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara**	**533,047,579,000**	**457,953,218,886**	**85.91**
1731	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara di Daerah	91,640,462,000	70,211,056,923	76.62
1732	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	21,424,613,000	18,982,014,063	88.60
1733	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepabeanan dan Cukai	27,521,807,000	19,015,740,361	69.09
1734	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	15,927,706,000	12,784,935,279	80.27
1735	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	17,994,458,000	14,916,340,277	82.89
1736	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perpajakan	30,860,536,000	26,846,850,272	86.99
1737	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepemimpinan dan Manajemen serta Pengelolaan Beasiswa Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan	83,011,544,000	76,681,274,857	92.37
1738	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara (Politeknik Keuangan Negara STAN)	172,958,992,000	150,671,373,972	87.11
1739	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPK	71,707,461,000	67,843,632,882	94.61

D. Realisasi Output Kegiatan

1. Realisasi Output BPPK Tahun Anggaran 2020

Realisasi Output Kegiatan BPPK Tahun Anggaran 2020 secara umum tergambarkan pada Tabel 3.5.

2. Permasalahan/Kendala yang Dihadapi

a. Pergeseran/mundurnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya

b. Perubahan metode pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang semula direncanakan tatap muka (klasikal) menjadi e-learning, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), atau webinar

c. Pergeseran/mundurnya jadwal pengadaan belanja modal dan adanya gagal lelang pengadaan, sehingga penyerapan tidak sesuai rencana

3. Penjelasan atas Realisasi Anggaran yang Tidak Mencapai Target

Secara umum, capaian output BPPK masih berjalan sesuai rencana. Sebagai contoh, output Lulusan Pembelajaran yang merupakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan seluruh satuan kerja di lingkungan BPPK telah melebihi target tahunan. Hal ini terjadi sebagai akibat lebih masifnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara daring yang dilaksanakan oleh BPPK selama masa pandemi yang mengakibatkan sebagian besar waktu bekerja dilaksanakan secara WFH. Demikian pula halnya dengan berbagai output lainnya sebagaimana terlihat di Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Realisasi Output Kegiatan BPPK
Tahun 2020

PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN			OUTPUT		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET	REALISASI	%
PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI BIDANG KEUANGAN NEGARA	***533,047,579,000***	***457,953,218,886***	***85.91***			
Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara di Daerah	***91,640,462,000***	***70,211,056,923***	***76.62***			
Lulusan Pembelajaran di Daerah	*35,812,607,000*	*18,298,319,484*	*51.09*	*11225*	*41870*	*373.01*
Dokumen Manajemen Pengetahuan	*256,370,000*	*103,605,342*	*40.41*	*124*	*153*	*123.39*
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	*12,642,145,000*	*12,304,349,315*	*97.33*	*1*	*1*	*100.00*
Layanan Dukungan Manajemen Satker	*1,872,818,000*	*1,205,451,242*	*64.37*	*1*	*1*	*100.00*
Layanan Perkantoran	*41,056,522,000*	*38,299,331,540*	*93.28*	*1*	*1*	*100.00*

PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN			OUTPUT		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET	REALISASI	%
Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	***21,424,613,000***	***18,982,014,063***	***88.60***			
Lulusan Pembelajaran di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	*5,402,006,000*	*3,665,123,970*	*67.85*	*34621*	*159341*	*460.24*
Program dan Materi Pembelajaran	*184,694,000*	*74,554,905*	*40.37*	*20*	*70*	*350.00*
Sertifikasi Kompetensi	*130,070,000*	*52,340,000*	*40.24*	*60*	*143*	*238.33*
Kajian Akademis	*140,000,000*	*54,460,467*	*38.90*	*5*	*5*	*100.00*
Dokumen Manajemen Pengetahuan	*57,858,000*	*8,991,000*	*15.54*	*106*	*114*	*107.55*
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	*2,094,714,000*	*2,093,014,088*	*99.92*	*1*	*1*	*100.00*
Layanan Dukungan Manajemen Satker	*402,653,000*	*163,600,941*	*40.63*	*1*	*1*	*100.00*
Layanan Perkantoran	*13,012,618,000*	*12,869,928,692*	*98.90*	*1*	*1*	*100.00*
Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepabeanan dan Cukai	***27,521,807,000***	***19,015,740,361***	***69.09***			
Lulusan Pembelajaran di Bidang Kepabeanan dan Cukai	*9,733,908,000*	*3,377,636,306*	*34.70*	*21269*	*50051*	*235.32*
Program dan Materi Pembelajaran	*505,565,000*	*104,334,500*	*20.64*	*10*	*47*	*470.00*
Sertifikasi Kompetensi	*440,471,000*	*377,367,326*	*85.67*	*66*	*46*	*69.70*
Kajian Akademis	*193,458,000*	*16,438,000*	*8.50*	*2*	*2*	*100.00*
Dokumen Manajemen Pengetahuan	*145,520,000*	*87,275,000*	*59.97*	*56*	*70*	*125.00*
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	*4,095,698,000*	*3,853,916,378*	*94.10*	*1*	*1*	*100.00*
Layanan Dukungan Manajemen Satker	*704,047,000*	*54,254,600*	*7.71*	*1*	*1*	*100.00*
Layanan Perkantoran	*11,703,140,000*	*11,144,518,251*	*95.23*	*1*	*1*	*100.00*
Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	***15,927,706,000***	***12,784,935,279***	***80.27***			
Lulusan Pembelajaran di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	*4,114,843,000*	*2,353,392,086*	*57.19*	*3486*	*9699*	*278.23*
Program dan Materi Pembelajaran	*1,343,595,000*	*1,046,291,050*	*77.87*	*50*	*176*	*352.00*
Sertifikasi Kompetensi	*109,348,000*	*40,000,000*	*36.58*	*1*	*1*	*100.00*
Kajian Akademis	*138,732,000*	*29,420,000*	*21.21*	*3*	*4*	*133.33*
Dokumen Manajemen Pengetahuan	*68,870,000*	*30,680,000*	*44.55*	*48*	*48*	*100.00*
Layanan Sarana dan Prasarana Internal			*89.96*	*1*	*1*	*100.00*

PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN			OUTPUT		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET	REALISASI	%
	1,844,691,000	*1,659,511,900*				
Layanan Dukungan Manajemen Satker	*229,280,000*	*55,764,760*	*24.32*	*1*	*1*	*100.00*
l Layanan Perkantoran	*8,078,347,000*	*7,569,875,483*	*93.71*	*1*	*1*	*100.00*
Pengembangan Kompetensi SDM Bidang selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	***17,994,458,000***	***14,916,340,277***	***82.89***			
Lulusan Pembelajaran di Bidang Keuangan Umum	*4,951,885,000*	*2,436,825,859*	*49.21*	*7325*	*90752*	*1238.94*
Program dan Materi Pembelajaran	*470,146,000*	*379,035,500*	*80.62*	*10*	*55*	*550.00*
Kajian Akademis	*218,403,000*	*74,708,888*	*34.21*	*2*	*7*	*350.00*
Dokumen Manajemen Pengetahuan	*31,006,000*	*13,346,700*	*43.05*	*44*	*60*	*136.36*
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	*2,176,815,000*	*2,163,720,864*	*99.40*	*1*	*1*	*100.00*
Layanan Dukungan Manajemen Satker	*210,713,000*	*101,691,327*	*48.26*	*1*	*1*	*100.00*
Layanan Perkantoran	*9,935,490,000*	*9,747,011,139*	*98.10*	*1*	*1*	*100.00*
Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perpajakan	***30,860,536,000***	***26,846,850,272***	***86.99***			
Lulusan Pembelajaran di Bidang Perpajakan	*8,491,821,000*	*6,050,473,225*	*71.25*	*7473*	*71503*	*956.82*
Program dan Materi Pembelajaran	*265,636,000*	*124,983,449*	*47.05*	*8*	*52*	*650.00*
Kajian Akademis	*112,240,000*	*80,013,577*	*71.29*	*5*	*5*	*100.00*
Dokumen Manajemen Pengetahuan	*69,560,000*	*6,000,000*	*8.63*	*108*	*117*	*108.33*
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	*3,034,370,000*	*2,975,236,182*	*98.05*	*1*	*1*	*100.00*
Layanan Dukungan Manajemen Satker	*642,640,000*	*418,152,957*	*65.07*	*1*	*1*	*100.00*
Layanan Perkantoran	*18,244,269,000*	*17,191,990,882*	*94.23*	*1*	*1*	*100.00*
Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepemimpinan dan Manajemen serta Pengelolaan Beasiswa Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan	***83,011,544,000***	***76,681,274,857***	***92.37***			
Lulusan Pembelajaran Kepemimpinan dan Manajemen	*10,283,636,000*	*6,725,440,920*	*65.40*	*15326*	*98210*	*640.81*
Karyasiswa Beasiswa Pascasarjana	*53,753,083,000*	*52,322,680,982*	*97.34*	*178*	*179*	*100.56*

PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN			OUTPUT		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET	REALISASI	%
Program dan Materi Pembelajaran	380,350,000	196,197,132	51.58	13	60	461.54
Alat Uji Kompetensi	372,989,000	351,161,955	94.15	3	3	100.00
Kajian Akademis	209,860,000	78,740,120	37.52	6	13	216.67
Dokumen Manajemen Pengetahuan	159,774,000	85,117,500	53.27	76	84	110.53
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2,171,473,000	2,052,595,629	94.53	1	1	100.00
Layanan Dukungan Manajemen Satker	689,949,000	264,272,854	38.30	1	1	100.00
Layanan Perkantoran	14,990,430,000	14,605,067,765	97.43	1	1	100.00
Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara (PKN STAN)	***172,958,992,000***	***150,671,373,972***	***87.11***			
Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan	32,786,843,000	27,225,232,804	83.04	10782	10756	99.76
Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama BLU	7,332,000,000	2,126,701,640	29.01	17	20	117.65
Program Pengabdian Masyarakat	2,266,314,000	1,178,404,600	52.00	40	45	112.50
Layanan Dukungan Kemahasiswaan	7,515,369,000	3,524,610,714	46.90	1	1	100.00
Hasil Penelitian	4,164,637,000	785,049,132	18.85	60	106	176.67
Jurnal	885,734,000	432,664,800	48.85	5	10	200.00
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	71,519,306,000	71,021,837,930	99.30	1	1	100.00
Layanan Dukungan Manajemen Satker	2,792,921,000	2,007,145,518	71.87	1	1	100.00
Layanan Perkantoran	43,695,868,000	42,369,726,834	96.97	1	1	100.00
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPK	***71,707,461,000***	***67,843,632,882***	***94.61***			
Jurnal	138,000,000	79,268,000	57.44	2	2	100.00
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	6,037,074,000	4,212,302,150	69.77	1	1	100.00
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	38,515,322,000	38,216,019,191	99.22	1	1	100.00
Layanan Perkantoran	27,017,065,000	25,336,043,541	93.78	1	1	100.00

Sedangkan, pembiayaan atas Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	SDM Keuangan Negara Berkompetensi Tinggi	Nilai Peningkatan Kompetensi SDM	81,940,692,000	44,832,608,386
2	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas Tinggi sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal Baik	81,940,692,000	44,832,608,386
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	172,662,632,000	124,581,827,276
		Indeks Persepsi Unit Pengguna terhadap Lulusan PKN STAN	32,786,843,000	27,225,232,804
4	Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang berkualitas tinggi	Persentase Tahapan Penyelesaian Kebijakan Kemenkeu Corporate University	58,454,305,000	55,316,502,868
5	Program yang Akomodatif	Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi A	3,149,986,000	1,925,396,536
		Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kemenkeu	78,790,706,000	42,907,211,850
6	Proses pembelajaran yang kreatif dan efektif	Indeks Persepsi Peserta Diklat terhadap Proses Pembelajaran	145,365,934,000	108,225,575,397
7	Evaluasi Kebijakan yang Komprehensif	Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi	81,940,692,000	44,832,608,386
8	SDM yang Kompeten, Kreatif dan Memiliki Perilaku yang tepat	Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	3,146,667,000	2,589,171,243
9	Organisasi yang Efisien, Efektif dan Memiliki Budaya yang tepat	Persentase Penyelesaian Blueprint Sertifikasi di Bidang Keuangan Negara	2,183,175,000	972,307,407
10	Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat Guna	Tingkat Downtime TIK	901,316,000	745,210,442
11	Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Optimal dan Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	5,549,740,000	4,079,205,604

E. Kinerja Lainnya

1. Pembelajaran

Implementasi IS RBTK #6 "*Modern E-Learning* sebagai alat utama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia" dengan target 50% pembelajaran digital melalui *full e-learning* di Tahun 2020 terealisasi sebesar 82,52%, yang terdiri dari 546 program dan 422.688 peserta.

2. Akreditasi

BPPK yang memperoleh kewenangan sebagai Lembaga Pengakreditasi Diklat Teknis di Bidang Keuangan Negara dari Lembaga Administrasi Negara telah menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan akreditasi pada tahun ini terhadap BPSDM Pemprov DKI Jakarta selaku lembaga yang telah diakreditasi. Pengawasan tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020.

3. Sertifikasi

Terkait pengelolaan sertifikasi di bidang keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPPK, pada tahun 2020 telah dilaksanakan sertifikasi/uji kompetensi yang diikuti oleh 896 peserta dengan rincian sebagai berikut:

a. Sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda (DJA), yang diikuti oleh 26 peserta.
b. Sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (DJPK), yang diikuti oleh 40 peserta.
c. Sertifikasi PPJK (DJBC), yang diikuti oleh 830 peserta terdaftar.

Pada tahun 2020, BPPK telah menetapkan IKU "Persentase kualitas implementasi program sertifikasi" untuk mengukur tingkat kepuasan peserta atas layanan program sertifikasi dan tingkat kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi. Target tahun 2020 adalah sebesar 80% dengan capaian sebesar 99,74% (tingkat kepuasan peserta sebesar 100% dan tingkat kesesuaian tahapan penyelenggaraan sebesar 99,57%) dari total 98 responden.

4. Inovasi Pembelajaran semasa Pandemi COVID-19

a. Program Pembelajaran *Open Access Learning*

Akibat pandemi COVID-19, pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan oleh BPPK tidak dapat diselenggarakan. Dalam rangka memastikan bahwa pengembangan SDM Kementerian Keuangan tetap dapat berjalan semasa pandemi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan terobosan menyediakan layanan *Open Access Learning* yang dapat diikuti oleh Pegawai Kementerian Keuangan dimana dapat bebas memilih sendiri program dan waktu penyelesaian *e-learning* sesuai kebutuhan peningkatan kinerjanya. Sampai dengan akhir tahun

2020, sebanyak 208 program *e-learning open access* telah diluncurkan, dan diikuti oleh sebanyak 98.353 pegawai (20,19% dari total 487.115 peserta pembelajaran).

b. Kementerian Keuangan *Corporate University Talk* (KCU Talk) dan Kementerian Keuangan *Corporate University Open Class* (KCU OC)

Kebijakan Pemerintah terkini terkait dengan keuangan negara (misalnya Pemulihan Ekonomi Nasional, Postur APBN dll.) yang ada cukup sulit dipahami oleh masyarakat maupun pegawai Kementerian Keuangan sendiri sehingga perlu dikomunikasikan secara luas.

BPPK menyediakan Kemenkeu *CorpU Talk* sebagai bentuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang merupakan eskalasi dari penyelenggaraan *open class* dengan bentuk kegiatan berupa seminar digital. Konsep Kemenkeu *Corpu Talk* ini adalah melakukan diseminasi kebijakan Kementerian Keuangan dengan penyampaian yang lebih ringan dan mudah. Kemenkeu *Corpu Talk* dan Kemenkeu *Open Class* merupakan *core* BPPK yang dapat diselenggarakan secara masif dengan tema-tema yang relevan dengan melibatkan narasumber baik internal maupun eksternal Kemenkeu, misalnya berkolaborasi dengan alumni LPDP atau melibatkan praktisi/akademisi di bidangnya. Sampai dengan akhir tahun 2020, telah diselenggarakan 23 Kemenkeu *CorpU Talk* yang diikuti oleh 50.687 peserta dan 80 KCU *Open Class*.

c. Program Pelatihan Jarak Jauh (PJJ)

Pelatihan Jarak Jauh (*Distance Learning*) diinisiasi untuk memfasilitasi pembelajaran yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu serta memfasilitasi pembelajaran terintegrasi. Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-82/PP/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh (*Distance Learning*) di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan diterbitkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2020, sebanyak 380 program telah dilaksanakan yang diikuti oleh 13.909 peserta.

5. Events Penting

a. Learning Council Meeting

Pada tanggal 28 September 2020, telah diselenggarakan *Learning Council Meeting* yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan dihadiri Wakil Menteri Keuangan, pejabat eselon I, Staf Ahli OBTI, serta para pejabat terkait yang membidangi pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Learning Council Meeting ini merupakan acara yang sangat penting karena dari kegiatan tersebut diperoleh arah kebijakan pengembangan SDM, terutama lagi dalam kondisi pandemi saat ini yang membutuhkan terobosan-terobosan dalam menjaga dan meningkatkan pengembangan SDM di Kementerian Keuangan.

Setelah *Learning Council Meeting* tersebut selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Harmonisasi Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 September 2020. Keseluruhan proses Analisis Kebutuhan Pembelajaran tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya akan diselenggarakan khususnya pada tahun 2021.

b. Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN)

Dengan mengusung tema "Peran APBN untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan di Tengah Gejolak Ekonomi Global", Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) dilaksanakan pada tanggal 4-5 November 2020. SNKN ini merupakan forum diseminasi ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan bidang kajian yang relevan dengan tusi Kementerian Keuangan. Pada kesempatan ini, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, maupun berbagai pakar di bidang keuangan berkesempatan menjadi narasumber.

c. *Launching* Kemenkeu *Learning Center* (KLC) *Mobile*

Dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang lebih mudah diakses dimana saja dan kapan saja, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan pengembangan KLC *Mobile* yang di-*launching* pada tanggal 3 Desember 2020 (Android) dan 10 Desember 2020 (IOS).

d. Survey Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan

Survey Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kementerian Keuangan dimaksudkan untuk mengukur indeks kepuasan publik atas pelayanan pada masing-masing jenis layanan di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2020 ini BPPK memperoleh nilai sebesai 4,41 yang lebih tinggi dari rata-rata Kementerian Keuangan (4,32).

e. Pelatihan Persiapan Penyuluhan Antikorupsi pada Pusdiklat Pengembangan SDM

Dalam mendukung Implementasi IS RBTK No. 1 Penguatan Budaya Organisasi Kemenkeu*: New Thinking of Working* dengan tujuan mewujudkan budaya kerja yang adaptif, berbasis digital, dan berintegritas guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan, BPPK telah menyelenggarakan Pelatihan Program Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi (PAK).

f. Kegiatan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi pada PKN STAN

Setelah mengikuti pelatihan Program Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi (PAK), maka alumni dapat mengikuti kegiatan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi. Pendaftaran dan bimtek *online* untuk mengikuti Sertifikasi PAK dibuka sejak tanggal 11 Mei s.d. 30 Juni 2020 melalui aplikasi SPAK (AKSESKU) dengan total pendaftar SPAK sebanyak 158 orang.

g. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2020

Pada peringatan hari antikorupsi sedunia yang diselenggarakan di Kementerian Keuangan pada tanggal 10 Desember 2020, BPPK memperoleh penghargaan sebagai unit terbaik pengelola LHKPN dengan jumlah wajib lapor < 300.

6. *Benchmarking* oleh K/L Lain

Sepanjang tahun 2020, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu menerima kunjungan langsung (sebelum pandemi) maupun *virtual* (selama pandemi) dari berbagai instansi dalam rangka *benchmarking* terkait implementasi Corporate University di Kementerian Keuangan maupun implementasi pembelajaran *e-learning* di BPPK Kementerian Keuangan. Berikut adalah pelaksanaan *benchmarking* tersebut:

No.	Nama Kementerian/ Lembaga	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab Materi dan Narasumber
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri	30/1/2020	Sekretariat Badan
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Tenaga Nuklir Indonesia	13/2/2020	Sekretariat Badan
3.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12/3/2020	Sekretariat Badan
4.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM	22/4/2020	Sekretariat Badan
5.	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan, Kementerian Kesehatan	30/4/2020	Sekretariat Badan
6.	BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat	14/9/2020	Sekretariat Badan
7.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	16/9/2020	Pusdiklat Keuangan Umum
8.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	30/9/2020	Sekretariat Badan
9.	BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	30/9/2020	Sekretariat Badan
10.	BPPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan	7/10/2020	Sekretariat Badan
11.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	12/10/2020	Sekretariat Badan
12.	BNI Corpu	20/10/2020	Sekretariat Badan
13.	BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	27/10/2020	Sekretariat Badan

No.	Nama Kementerian/ Lembaga	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab Materi dan Narasumber
14.	BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	27/10/2020	Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia
15.	BPSDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	27/10/2020	Sekretariat Badan
16.	BPSDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	10/11/2020	Sekretariat Badan dan Pusdiklat KNPK
17.	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama	17/11/2020	Sekretariat Badan
18.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan	17/11/2020	Pusdiklat Keuangan Umum
19.	Komisi Pemberantasa Korupsi	2/12/2020	Sekretariat Badan
20.	Kementerian Agama	8/12/2020	Sekretariat Badan, Pusdiklat Pajak, dan Pusdiklat AP
21.	BPPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan	10/12/2020	Pusdiklat Keuangan Umum
22.	BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	17/12/2020	Sekretariat Badan (*sit in* Tim Gugus Tugas)

7. Penghargaan dari Institusi/Lembaga di Luar Kemenkeu

a. Majalah Edukasi Keuangan (mewakili Kementerian Keuangan) memperoleh penghargaan ***1st Winner*** **kategori** ***The Best Inhouse Magazine in Government Institution*** dari *Indonesia Content Marketing Awards* (ICMA) 2020. Penghargaan tersebut diperoleh pada acara *Indonesia Content Marketing Forum* (ICMF) 2020 yang berlangsung pada tanggal 8-10 September 2020.

b. Pusdiklat Bea dan Cukai BPPK secara resmi ditetapkan sebagai ***World Customs Organization (WCO) Regional Training Center***. Status tersebut diperoleh pada *acara Joint Session of 21st Regional Head of Customs Administration (RHCA) Conference and 30th Regional Contact Point (RCP) Meeting* yang berlangsung pada tanggal 12 November 2020.

c. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Balai Diklat Keuangan Manado dan Balai Diklat Kepemimpinan BPPK memperoleh penghargaan **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Desember 2020.

Bab IV: Penutup

BPPK sebagai mitra strategis bagi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengembangan SDM keuangan negara. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut BPPK juga didukung oleh pendanaan yang memadai. Besarnya dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit Kementerian Keuangan, khususnya di bidang pengembangan SDM keuangan negara. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Laporan Kinerja Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BPPK pada Tahun 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Besaran Nilai Kinerja Organisasi adalah 112,42. Keseluruhan dari dua puluh Indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai dan melampaui targetnya yang merupakan cerminan upaya peningkatan kinerja BPPK kearah yang makin baik. Berbagai pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan transformasi kelembagaan serta upaya aktif anti korupsi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap sumber daya yang dimiliki.

Untuk mewujudkan strategi dan kebijakan pada periode Tahun Anggaran 2020 ini, BPPK memiliki 1 program dan 9 kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 533.047.579.000 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 ini terealisasi untuk membiayai program kegiatan sebesar Rp. 475,953,218,886 atau 85,91%.

Realisasi dan capaian anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara di Daerah memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 91,640,462,000 dan direalisasikan sebesar Rp. 70,211,056,923 atau tercapai 76.62%.
2. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Anggaran dan Perbendaharaan memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.424.613.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 18,982,014,063 atau tercapai 88.60%.

3. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepabeanan dan Cukai memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 27,521,807,000 dan direalisasikan sebesar Rp. 19,015,740,361 atau tercapai 69.09%.
4. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 15,927,706,000 dan direalisasikan sebesar Rp. 12,784,935,279 atau tercapai 80.27%.
5. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 17.994,458,000 dan direalisasikan sebesar Rp. 14,916,340,277 atau tercapai 82,89%.
6. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perpajakan memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 30,860,536,000 dan direalisasikan sebesar Rp. 26,846,850,272 atau tercapai 86.99%.
7. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana bagi Pegawai Kementerian Keuangan memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 83,011,544,000 dan direalisasikan sebesar Rp. 76,681,274,857 atau tercapai 92.37%.
8. Pengembangan Kompetensi SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 172,958,992,000 dan direalisasikan sebesar Rp. 150,671,373,972 atau tercapai 87.11%.
9. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 71,707,461,000 dan direalisasikan sebesar Rp. 67,843,632,882 atau tercapai 94.61%.

Capaian IKU BPPK Tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh 20 IKU memiliki status hijau sebagai berikut:

1. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya (realisasi: 99,36% dari target: 90%)
2. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya (realisasi: 99,51% dari target: 85%)
3. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik (realisasi: 96,12% dari target: 93%)
4. Indeks kepuasan pengguna layanan (realisasi: 4,41 dari target: 4)
5. Persentase pengembangan *Instructional System Design* (realisasi: 100% dari target: 100%)
6. Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A (realisasi: 100% dari target: 100%)
7. Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital (realisasi: 82,52% dari target: 50%)

8. Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC (realisasi: 111,46% dari target: 100%)
9. Indeks kualitas penelitian (realisasi: 238 dari target: 90)
10. Persentase kualitas implementasi program sertifikasi (realisasi: 100% dari target: 80%)
11. Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran (realisasi: 5 dari target: 4)
12. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan (realisasi: 98% dari target: 93,67%)
13. Persentase efisiensi belanja birokrasi (realisasi: 73,87% dari target: 10%)
14. Persentase penyelesaian program RBTK (realisasi: 93,42% dari target: 85%)
15. Indeks integritas organisasi (realisasi: 108,68 dari target: 95,05)
16. Tingkat implementasi *learning organization* (realisasi: 95,59 dari target: 75)
17. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti (realisasi: 92,52% dari target: 89%)
18. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 (realisasi: 94 dari target: 85)
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (realisasi: 98,24% dari target: 95%)
20. Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK (realisasi: 100% dari target: 85%).

Secara kumulatif, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2020 adalah sebesar 112,42 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (110,66). Kenaikan tersebut menggambarkan upaya perbaikan terus-menerus yang dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang masih akan terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang.

Lampiran I:

Pengukuran Kinerja BPPK

Tahun 2020

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

Unit Organisasi : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Program : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode SS /IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target	Realisasi	Capaian
	STAKEHOLDER PERSPECTIVE (25%)			**110,40**
1	**Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien**			**110,40**
1a-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	99,36%	**110,40**
	CUSTOMER PERSPECTIVE (15%)			**110,23**
2	**Tata kelola dan sumber daya Kementerian yang optimal**			**110,23**
2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	85%	99,51%	**117,07**
2b-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%	96,12%	**103,35**
2c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	4	4,41	**110,25**
	INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)			**115,15**
3	**Perencanaan pembelajaran yang berkualitas tinggi**			**100**
3a-N	Persentase pengembangan *instructional system design*	100%	100%	**100**
3b-N	Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	100%	100%	**100**
4	**Program pembelajaran yang kreatif**			**120**
4a-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	50%	82,52%	**120**
5	**Manajemen pengetahuan yang berkualitas**			**115,73**
5a-N	Tingkat pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100%	111,46%	**111,46**
5b-N	Indeks kualitas penelitian	90	238	**120**

Kode SS /IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target	Realisasi	Capaian
6	**Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan**			**120**
6a-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	80%	100%	**120**
7	**Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif**			**120**
7a-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4	5	**120**
	LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (30%)			**112,46**
8	**Organisasi dan SDM yang optimal**			**113,81**
8a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	93,67%	98%	**104,62**
8b-CP	Persentase efisiensi belanja birokrasi	10%	73,87%	**120**
8c-CP	Persentase penyelesaian program RBTK	85%	93,42%	**109,91**
8d-CP	Indeks integritas organisasi	95,05	108,68	**114,34**
8e-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	75	95,59	**120**
9	**Pengelolaan keuangan yang optimal**			**105,92**
9a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89%	92,52%	**103,96**
9b-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	85	94	**111,09**
9c-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	98,24%	**103,41**
10	**Sistem manajemen informasi yang andal**			**117,65**
10a-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	85%	100%	**117,65**
	NILAI KINERJA ORGANISASI			**112,42**

LAMPIRAN II:

Penetapan Kinerja BPPK

Tahun 2020

KONTRAK KINERJA
NOMOR: 11/KK/2020
KEPALA BADAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

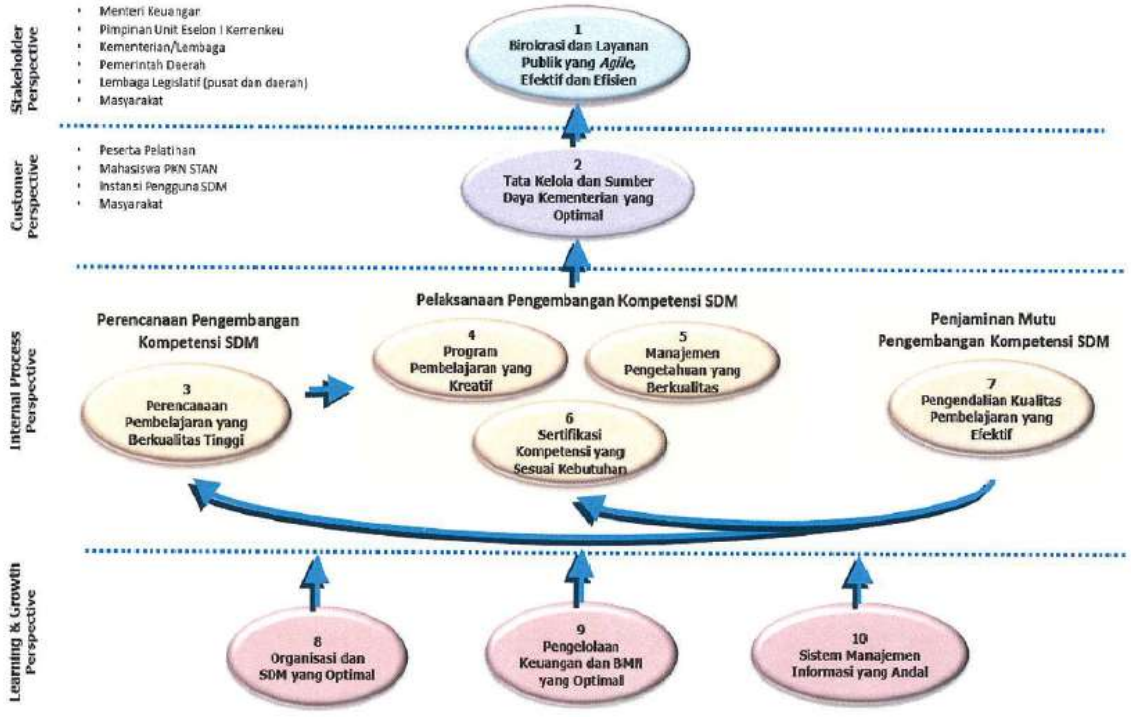

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien	1a-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%
2.	Tata kelola dan sumber daya Kementerian yang optimal	2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	85%
		2b-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%
		2c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	4 (skala 5)
3.	Perencanaan pembelajaran yang berkualitas tinggi	3a-N	Persentase pengembangan *instructional system design*	100%
		3b-N	Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	100%
4.	Program pembelajaran yang kreatif	4a-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	50%
5.	Manajemen pengetahuan yang berkualitas	5a-N	Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC	100%
		5b-N	Indeks kualitas penelitian	90
6.	Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan	6a-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	80%
7.	Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif	7a-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4 (skala 5)
8.	Organisasi dan SDM yang optimal	8a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	93,67%
		8b-CP	Persentase penyelesaian *delayering*	100%
		8c-CP	Persentase efisiensi belanja birokrasi	10%
		8d-CP	Persentase penyelesaian program RBTK	82%
		8e-CP	Indeks integritas organisasi (IPI dan ZI WBK)	95,05
		8f-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	75 (skala 100)
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti	89%
		9b-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
10.	Sistem manajemen informasi yang andal	10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100

Kegiatan		Anggaran
1.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara di Daerah	Rp 111.863.223.000,00
2.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	Rp 24.568.011.000,00
3.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepabenan dan Cukai	Rp 41.811.797.000,00
4.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	Rp 17.698.660.000,00
5.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	Rp 32.019.804.000,00
6.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perpajakan	Rp 35.648.536.000,00
7.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepemimpinan dan Manajemen serta Pengelolaan Bea Siswa Pascasarjana bagi Pegawai Kementerian Keuangan	Rp 132.691.448.000,00
8.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara (Politeknik Keuangan Negara STAN)	Rp 263.554.675.000,00
9.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPK	Rp 70.073.111.000,00

Jakarta, Januari 2020

Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

Rionald Silaban

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Sri Mulyani Indrawati	1	Nama	Rionald Silaban
2	NIP	-	2	NIP	19660423 199010 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	-	3	Pangkat/ Gol. Ruang	IV/e/Pembina Utama
4	Jabatan	Menteri Keuangan	4	Jabatan	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
5	Unit Kerja	Kementerian Keuangan	5	Unit Kerja	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1.	Meningkatkan kinerja alumni pelatihan		90%	100	12	-
2.	Meningkatkan kualitas perilaku kerja alumni pelatihan		85%	100	12	-
3.	Menghasilkan lulusan pendidikan dan pelatihan dari Kemenkeu dengan predikat minimal baik		93%	100	12	-
4.	Meningkatkan kepuasan pengguna layanan		4 (skala 5)	100	12	-
5.	Mengembangkan *instructional system design*		100%	100	12	-
6.	Menghasilkan program pelatihan dengan nilai validasi A		100%	100	12	-
7.	Menyelenggarakan pembelajaran digital		50%	100	12	-
8.	Meningkatkan pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC		100%	100	12	-
9.	Memenuhi indeks kualitas penelitian		90	100	12	-
10.	Meningkatkan kualitas implementasi program sertifikasi		80%	100	12	-
11.	Memenuhi standar kualitas pembelajaran		4 (skala 5)	100	12	-
12.	Meningkatkan pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan		93,67%	100	12	-
13.	Menyelesaikan *delayering*		100%	100	12	-
14.	Mewujudkan belanja birokrasi yang efisien		10%	100	12	-
15.	Mewujudkan organisasi yang berintegritas tinggi		95,05	100	12	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
16.	Menyelesaikan program RBTK		85%	100	12	-
17.	Menwujudkan *learning organisation*		75 (skala 100)	100	12	-
18.	Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LK BA 15		89%	100	12	-
19.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran		95%	100	12	Rp 641,18 M
20.	Mengelola sistem TIK yang berkualitas		100	100	12	-

Jakarta, Januari 2020

Pejabat Penilai,

Sri Mulyani Indrawati

PNS yang dinillai,

Rionald Silaban

NIP 19660423 199010 1 001

ADENDUM KONTRAK KINERJA

NOMOR: 11A/KK/2020

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Kontrak Kinerja Nomor: 11/KK/2020 tanggal 29 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:

A. Penambahan IKU

Sebelum	Menjadi					
	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
			Q1	Q2	Q3	Q4
-	9a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	-	89%

B. Penambahan subIKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
8e-CP	Indeks integritas organisasi (IPI dan ZI WBK)	-	-	-	95,05	8d-CP	Indeks integritas organisasi (IPI dan ZI WBK)	-	-	-	95,05
						8d1-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	-	100
						8d2-CP	Indeks persepsi integritas	-	-	-	90,10

C. Perubahan *trajectory*

Kode IKU	IKU	Sebelum				Menjadi			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
7a-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	-	4	-	4	-	-	-	4 (skala 5)
8a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	-	93,67%	-	93,67%	-	-	-	93,67%

Kode IKU	IKU	Sebelum				Menjadi			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
8c-CP	Persentase efisiensi belanja birokrasi	10%	10%	10%	10%	-	-	-	10%

D. Penghapusan IKU

Menjadi						Menjadi
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				
		Q1	Q2	Q3	Q4	
8b-CP	Persentase penyelesaian *delayering*	40%	60%	80%	100%	-

Keterangan:

1. Perubahan IKU dan *trajectory* target IKU mengacu pada peraturan yang berlaku terkait Pandemik Covid-19;
2. Adendum Kontrak Kinerja berlaku sejak triwulan I tahun 2020.

Jakarta, 2020

Menyetujui,
Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

Rionald Silaban

LAMPIRAN

Adendum Kontrak Kinerja
Nomor: 11A/KK/2020

Perubahan pada Manual IKU

Kode IKU	IKU	Sebelum	Menjadi
2b-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Formula: $= \frac{\textit{Jumlah lulusan minimal baik}}{\textit{Jumlah peserta ujian}}$ X 100%	Formula: = 70% x $\frac{\textit{Jumlah lulusan tatap muka minimal baik}}{\textit{Jumlah peserta ujian tatap muka}}$ + 30% x $\frac{\textit{Jumlah lulusan elearning minimal baik}}{\textit{Jumlah peserta ujian elearning}}$

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA BADAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien							
1a-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	-	90%	90%	-	-	90%	90%
2.	Tata kelola dan sumber daya Kementerian yang optimal							
2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	-	-	-	-	-	85%	85%
2b-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
2c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	-	4	4 (skala 5)
3.	Perencanaan pembelajaran yang berkualitas tinggi							
3a-N	Presentase pengembangan *instructional system design*	10%	35%	35%	75%	75%	100%	100%
3b-N	Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	-	100%	100%	-	100%	100%	100%
4.	Program pembelajaran yang kreatif							
4a-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	-	19,25%	19,25%	-	19,25%	50%	50%
5.	Manajemen pengetahuan yang berkualitas							
5a-N	Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC	20%	35%	35%	70%	70%	100%	100%
5c-N	Indeks kualitas penelitian	-	-	-	-	-	90	90
6.	Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan							
6a-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	-	-	-	-	-	80%	80%

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7.	Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif							
7a-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	-	4	4	-	4	4	4 (skala 5)
8.	Organisasi dan SDM yang optimal							
8a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	-	93,67%	93,67%	-	93,67%	93,67%	93,67%
8b-CP	Persentase penyelesaian *delayering*	40%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
8c-CP	Persentase efisiensi belanja birokrasi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
8d-CP	Indeks integritas organisasi (IPI dan ZI WBK)	-	-	-	-	-	95,05	95,05
8e-CP	Persentase penyelesaian program RBTK	8,20%	21,19%	21,19%	29,80%	29,80%	85%	85%
8f-CP	Tingkat implementasi *learning organisation*	-	-	-	-	-	75	75 (skala 100)
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
9a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	89%	89%
9a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
10.	Sistem manajemen informasi yang andal							
10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	-	-	-	-	-	100	100

Jakarta, Januari 2020

PNS yang dinilai,

Rionald Silaban

INISIATIF STRATEGIS
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	*Output*/ *Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	*Output*			
1.	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	*Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara	Lulusan pembelajaran di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dengan penguasaan kompetensi dasar pengelolaan keuangan negara sebanyak 3.500 peserta Kementerian Keuangan dan 7.000 peserta kementerian/lembaga lain.	1. Perencanaan dan persiapan program *Basic E-Learning* Manajemen Keuangan Negara a. Kementerian Keuangan b. Kementerian/Lembaga	1. Jadwal penyelenggara 2. *Updating* materi pembelajaran	Januari s.d. Oktober 2020	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	489,35 jt
				2. Penyelenggaraan dan evaluasi *Basic E-Learning* Manajemen Keuangan Negara a. Kementerian Keuangan b. Kementerian/Lembaga	10.500 peserta Kementerian Keuangan dan Kementerian/ Lembaga **Target:** Q1: 1.750 peserta Q2: 1.400 peserta Q3: 4.550 peserta Q4: 2.800 peserta	Februari s.d. Desember 2020		

Jakarta, Januari 2020

PNS yang dinilai,

Rionald Silaban